

SKRIPSI

ANALISIS BEBAN PAJAK TANGGUHAN DALAM MENDETEKSI PROBABILITAS MANAJEMEN LABA (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)

HADI KUSUMA NINGRAT



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

SKRIPSI

ANALISIS BEBAN PAJAK TANGGUHAN DALAM MENDETEKSI PROBABILITAS MANAJEMEN LABA (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

HADI KUSUMA NINGRAT
A31107096



Kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

SKRIPSI

ANALISIS BEBAN PAJAK TANGGUHAN DALAM MENDETEKSI PROBABILITAS MANAJEMEN LABA (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)

Disusun dan diajukan oleh

**HADI KUSUMA NINGRAT
A31107096**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, Oktober 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. M. Natsir Kadir, M.Si., Ak.
NIP. 19530812 198703 1 001

Drs. M. Achyar Ibrahim, M.Si.,Ak.
NIP. 19601225 199203 1 007

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Kartini, SE, M.Si, Ak.
NIP. 19650305 199203 2 001

SKRIPSI

ANALISIS BEBAN PAJAK TANGGUHAN DALAM MENDETEKSI PROBABILITAS MANAJEMEN LABA (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)

disusun dan diajukan oleh

HADI KUSUMA NINGRAT
A31107096

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

pada tanggal **13 Februari 2014**

telah dinyatakan memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Drs. H. M. Natsir Kadir, M.Si., Ak.	Ketua	1.
2. Drs. M. Achyar Ibrahim, M.Si.,Ak.	Sekretaris	2.
3. Drs. Daeng Siraja, M.Si.,Ak.	Anggota	3.
4. Drs. Muh. Nur Azis, MM	Anggota	4.
5. Drs. Haerial, M.Si.,Ak.	Anggota	5.

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Kartini, SE, M.Si, Ak.
NIP. 19650305 199203 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Hadi Kusuma Ningrat

NIM : A31107096

Jurusan/program studi : Akuntansi/S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**ANALISIS BEBAN PAJAK TANGGUHAN DALAM MENDETEKSI
PROBABILITAS MANAJEMEN LABA
(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, Februari 2014

Yang membuat pernyataan,

Hadi Kusuma Ningrat

ABSTRAK

Analisis Beban Pajak Tangguhan Dalam Mendeteksi Probabilitas Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)

Analysis of Deffered Tax Expense in Detecting Earnings Management Probability (Studies in Manufacturing Companies Listed on the Stock Exchange)

Hadi Kusuma Ningrat
M. Natsir Kadir
M. Achyar Ibrahim

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban pajak tangguhan terhadap probabilitas manajemen laba. Objek penelitiannya ialah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan tahun 2008 sampai tahun 2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data berdasarkan laporan keuangan tahunan yang diperoleh melalui situs www.idx.co.id. Metode pengambilan sample dengan menggunakan *purposive sampling* dan metode analisis data menggunakan regresi logistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Kemudian peningkatan beban pajak tangguhan tidak mempengaruhi peningkatan probabilitas perusahaan dalam melakukan manajemen laba.

Kata Kunci: Pajak, beban pajak tangguhan, manajemen laba.

This study aims to analyze the effect of deferred tax expense on the probability of earnings management. The object of research is the manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) the observation period of 2008 through 2010. The data used in this study is based on annual financial reports obtained through the site www.idx.co.id. The sampling method use purposive sampling and methods of data analysis use logistic regression. The results of this research indicate that the deferred tax expense does not significant on the probability of the company in earnings management. Then an increase in deferred tax expense does not affect the probability of an increase in the company in earnings management.

Key Words: Tax, deffered tax expense, earnings management.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat penelitian	6
 BAB II LANDASAN TEORI	 8
A. Pajak	8
1. Pengertian Pajak	8
2. Jenis Pajak	9
3. Subjek Pajak	11
B. PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan	12
1. Tujuan PSAK No. 46	12
2. Terminologi yang Digunakan dalam PSAK No. 46	12
3. Akuntansi Pajak Penghasilan	15
C. Beban Pajak Tangguhan	18
D. Laba	28
1. Pengertian Laba	28
2. Tujuan Pelaporan Laba	28
E. Manajemen Laba	29
1. Pengertian Manajemen Laba	29
2. Tujuan Melakukan Manajemen Laba	32
3. Teknik Manajemen Laba	33
F. Pendekatan dalam Memprediksi Manajemen Laba	35
1. Penggunaan Distribusi Laba dalam Memprediksi Manajemen Laba	35
2. Beban Pajak Tangguhan dalam Memprediksi Manajemen Laba	37

G. Penelitian Terdahulu	38
H. Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Definisi Operasional dan pengukuran Variabel	43
1. Definisi Operasional Variabel	43
2. Pengukuran Variabel	43
B. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel	44
C. Teknik Pengumpulan Data	45
D. Teknik Analisis	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Proses Seleksi Sampel	48
B. Deskripsi Hasil Penelitian	50
1. Beban Pajak Tangguhan	50
2. Manajemen Laba	52
C. Statistik Deskriptif	53
D. Analisis Regresi Logistik	55
1. <i>Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test</i>	55
2. Uji Model Fit	55
3. <i>Model Summary</i>	57
4. Hasil Pengujian Secara Paralel	57
E. Pembahasan	59
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
C. Keterbatasan	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Matriks Penelitian Terdahulu	40
4.1 Proses Seleksi Sampel	48
4.2 Daftar Perusahaan yang Menjadi Objek Penelitian	49
4.3 Beban Pajak Tangguhan	50
4.4 Manajemen Laba	52
4.5 <i>Descriptive Statistic Small Loss Firms</i>	53
4.6 <i>Descriptive Statistic Small Profit Firms</i>	54
4.7 <i>Hosmer and Lemeshow Test</i>	55
4.8 <i>Iteration History a, b, c</i>	56
4.9 <i>Iteration History a, b, c, d</i>	56
4.10 <i>Model Summary</i>	57
4.11 <i>Variables in the Equation</i>	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi tentang laba (*earnings*) mempunyai peran sangat penting bagi pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan. Pihak internal dan eksternal perusahaan sering menggunakan laba sebagai dasar pengambilan keputusan seperti pemberian kompensasi dan pembagian bonus kepada manajer, ukuran prestasi atau kinerja manajemen dan dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Oleh karena itu, kualitas laba menjadi pusat perhatian bagi investor, kreditor, pembuat kebijakan akuntansi, dan pemerintah (dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak). Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba (*sustainable earnings*) di masa depan, yang ditentukan oleh komponen akrual dan aliran kasnya.

Laba merupakan ukuran paling sederhana untuk menilai kinerja sebuah perusahaan. Dalam menganalisis laporan keuangan laba sering digunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, sehingga banyak manajer yang memanfaatkan peluang untuk merekayasa angka laba (*earnings management*) dengan rekayasa akrual untuk mempengaruhi hasil akhir dari berbagai keputusan baik yang ditujukan untuk pihak internal perusahaan maupun yang ditujukan untuk pihak eksternal perusahaan.

Manajemen laba yang dilakukan perusahaan dapat dilakukan dengan memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi dan pemilihan metode akuntansi. SAK mengizinkan manajemen untuk melakukan *judgement*

terhadap estimasi akuntansi, seperti estimasi piutang tak tertagih, masa manfaat aktiva tetap dan nilai sisa dari aset tetap tersebut serta kurun waktu amortisasi aset tak berwujud. Sedangkan dalam peraturan perpajakan, estimasi piutang tak tertagih tidak diizinkan sebagai pengurang pendapatan dalam menghitung laba fiskal. Peraturan perpajakan juga sudah mengatur masa manfaat aktiva tetap dan aktiva tak berwujud serta tarif penyusutannya yang dibedakan berdasarkan pengelompokan aktiva tersebut.

Pilihan metode akuntansi yang ditawarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) juga lebih banyak dari pada yang ditawarkan oleh peraturan perpajakan. Beberapa contoh menurut IAI dalam PSAK No. 14 memberikan alternatif bagi manajemen dalam mengukur persediaan berdasarkan *historical cost*, *replacement cost* atau COMWIL (*Cost Or Market Whichever Is Lower*). Sedangkan peraturan perpajakan hanya memperkenankan pengukuran persediaan berdasarkan *historical cost*. Selain itu metode penilaian yang diizinkan SAK terdiri dari FIFO, LIFO, dan *average*. Sedangkan peraturan perpajakan hanya memperkenankan FIFO dan *average*. Dari beberapa contoh di atas sangatlah jelas bahwa peraturan perpajakan lebih ketat dalam menghitung besarnya laba fiskal.

Menurut IAI dalam PSAK No. 46 diatur mengenai perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dimana beban pajak tangguhan termasuk di dalamnya. PSAK No. 46 terdapat beberapa pernyataan yang dapat memberikan kebebasan manajemen dalam menentukan pilihan kebijakan akuntansi dalam menentukan besaran pencadangan beban/penghasilan pajak tangguhan atas adanya perbedaan antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan. PSAK No. 46 ini diterbitkan untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak penghasilan. Penerapan PSAK No.46 tentu saja akan

membawa konsekuensi bagi *reported net income* perusahaan, dimana laporan keuangan perusahaan yang disorot berbagai *users* terutama investor yang akan berinvestasi.

Implikasi PSAK No.46 yang dikaitkan dengan isu manajemen laba sebagaimana dijelaskan dalam *positive accounting theory*. *Positive accounting theory* merupakan teori yang membahas mengenai pemilihan prinsip akuntansi oleh manajer dan bagaimana manajer bereaksi atas standar akuntansi yang diajukan (Scott, 2003 dalam Amali, 2009). *Positive accounting theory* yang di dalamnya menyangkut Teori keagenan (*Agency Theory*) kemudian mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik (dalam hal ini adalah pemegang saham) sebagai prinsipal. Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. dikaitkan dengan peningkatan nilai perusahaan, ketika terdapat asimetri informasi, manajer dapat memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada investor guna memaksimalkan nilai saham perusahaan. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan (*disclosure*) informasi akuntansi. Kesimpulan yang bisa ditarik ialah keunggulan informasi yang dimiliki perusahaan dapat menjadi alat untuk memenuhi motivasi perusahaan melalui sebuah praktik yang kemudian dikenal dengan istilah *earnings management* atau manajemen laba.

Menurut Phillips, Pincus dan Rego (2003), ada tiga motivasi utama yang mendorong perusahaan melakukan manajemen laba yaitu:

1. Menghindari penurunan laba,
2. Menghindari kerugian,
3. Menghindari kegagalan peramalan yang dibuat analis.

Motivasi pertama bertujuan untuk menghindari melaporkan penurunan laba yang berhubungan dengan hipotesis perataan laba atau *Income Smoothing Hypothesis*. Motivasi kedua bertujuan untuk menghindari kerugian, dimana hal ini dilakukan banyak alasan yang mendorong perusahaan dalam menghambat perkembangan perusahaan, faktanya bahwa perusahaan mengalami kerugian juga berpotensi menurunkan harga saham, menurunkan kepercayaan investor dan kreditur serta mendorong dilakukannya pemeriksaan pajak oleh aparat pajak. Motivasi yang ketiga bertujuan untuk menghindari kegagalan yang dibuat analisis.

Menurut Stice, dan Skousen (2006) ada empat macam faktor yang memotivasi para manajer untuk melakukan manajemen laba yang dilaporkan yaitu:

1. Memenuhi target internal,
2. Memenuhi harapan eksternal,
3. Meratakan atau memuluskan laba (*income smoothing*),
4. Mendandani laporan keuangan (*window dressing*) untuk keperluan penawaran saham perdana (*Initial Public Offering - IPO*) atau untuk memperoleh pinjaman dari bank.

Sampai saat ini manajemen laba merupakan area yang paling kontroversial dalam akuntansi keuangan. Pihak yang kontra terhadap manajemen laba seperti investor, berpendapat bahwa manajemen laba merupakan pengurangan keandalan informasi laporan keuangan sehingga dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Di lain sisi pihak yang pro terhadap manajemen laba seperti manajer, menganggap bahwa manajemen laba merupakan hal yang fleksibel untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian yang tidak terduga.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang manajemen laba serta untuk menguji beban pajak tangguhan. Apakah indikator tersebut dapat digunakan sebagai pendeteksi manajemen laba seperti yang dilakukan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya tetapi dengan memanfaatkan data-data teraktual. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“ANALISIS BEBAN PAJAK TANGGUHAN DALAM MENDETEKSI PROBABILITAS MANAJEMEN LABA (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap probabilitas dalam melakukan manajemen laba?
2. Apakah semakin tinggi Beban Pajak Tangguhan maka semakin besar probabilitas dalam melakukan manajemen laba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh Beban pajak Tangguhan terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba.
2. Untuk membuktikan bahwa semakin tinggi Beban Pajak Tangguhan maka semakin besar probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan terkhusus pada beban pajak tangguhan, manajemen laba, serta probabilitas perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI melakukan manajemen laba berdasarkan beban pajak tangguhannya.

2. Bagi manajemen

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada manajemen dalam meningkatkan persepsi positif para pengguna laporan keuangan terhadap kualitas laba akuntansi yang dilaporkan melalui pengelolaan perbedaan temporer.

3. Bagi investor

Penelitian ini dapat digunakan oleh investor untuk mengetahui atau untuk memperoleh informasi apakah manajemen melakukan rekayasa laba dalam melaporkan keuangan.

4. Bagi akademisi

Dapat digunakan sebagai bahan literatur dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait analisis beban pajak tangguhan dalam mendeteksi manajemen laba.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian pajak

Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Sehingga pemerintah semakin giat dengan mendorong masyarakat agar dapat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena tanggung jawab dalam melaksanakan pembayaran pajak tergantung dari wajib pajak itu sendiri, pemerintah dan aparatur negara hanya berkewajiban membuka, meneliti, mengawas dan memeriksa mengenai proses pembayaran pajak yang dilakukan agar sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan.

Berbagai batasan dan definisi tentang pajak dikemukakan oleh banyak ahli dari waktu ke waktu , walaupun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami.

Menurut Rochmat Soemitro (2008):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut P.J.A. Andriani (2010):

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

Merupakan hal yang sangat mendasar, dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat, masalah *tax base* dan *tax rate* harus melalui persetujuan rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat. Hasil persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang dikenakan kewajiban perpajakan.

2. Pajak dapat dipaksakan

jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan maka Wajib Pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Undang-undang yang telah disahkan oleh perwakilan rakyat secara pasti memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Fiskus selaku pemungut pajak dapat memaksakan wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya.

2. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

b. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Contoh Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir.

3. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2000 memerinci subjek pajak sebagai berikut:

a. Subjek Pajak Orang Pribadi.

Subjek pajak orang pribadi meliputi Wajib Pajak yang bertempat tinggal di dalam negeri maupun yang bertempat tinggal di luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia.

b. Subjek Pajak Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak Pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

c. Subjek Pajak Badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk reksa dana.

d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

B. PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan

1. Tujuan dari PSAK No. 46

Tujuan dari dikeluarkannya PSAK No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan antara lain:

- a. Mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan
- b. Dalam akuntansi pajak penghasilan, agar dilakukan pengakuan (*recognition*) terhadap *future tax effect* yang timbul sebagai akibat adanya transaksi dan peristiwa yang telah diakui dalam laporan keuangan dan SPT. Di samping itu agar dilakukan pengakuan terhadap *future tax effect* dari kompensasi kerugian fiskal yang belum digunakan apabila persyaratan tertentu terpenuhi.
- c. Pengakuan *future tax effect* dilakukan dengan mengakui adanya aktiva pajak tangguhan (*deferred tax assets*) dan kewajiban pajak tangguhan dalam PSAK No. 46 dilakukan dengan menggunakan *Balance Sheet Liability Method*.
- d. Mengatur tentang penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan serta pengungkapan informasi yang relevan.

2. Terminologi yang Digunakan dalam PSAK No. 46

Dalam PSAK No. 46 terdapat istilah baru yang digunakan, antara lain:

- a. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

- b. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.
- c. Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak.
- d. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal (*taxable profit*) atau rugi pajak (*tax loss*) adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan.
- e. Beban pajak (*tax expense*) atau penghasilan pajak (*tax income*) adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang dihitung dalam laba atau rugi satu periode.
- f. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak satu periode.
- g. Kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
- h. Aktiva pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya:
 - 1. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan
 - 2. Sisa kompensasi kerugian
- i. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya. Perbedaan temporer dapat berupa:

1. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi.
 2. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi.
- j. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) aktiva tau kewajiban adalah nilai aktiva atau kewajiban yang diakui oleh Direktorat Jendral Pajak dalam penghitungan laba fiskal.
- k. Surat ketetapan pajak dalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak yang dapat berupa:
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang menentukan besar jumlahnya pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah suatu surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena

jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

4. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

l. Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

3. Akuntansi Pajak Penghasilan

Masalah timbul ketika adanya perbedaan-perbedaan antara laba kena pajak (*taxable income*) sebagaimana yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan laba sebelum kena pajak yang ditentukan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Apakah perlu diadakan alokasi pajak penghasilan terhadap pengaruh pajak (*tax effects*) atas perbedaan-perbedaan tersebut. Di sini muncul dua pendapat yang berbeda di antara para akuntan. Beberapa menyatakan bahwa pajak yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah pajak yang benar-benar terjadi atau dikenakan pada tahun yang bersangkutan. Sehingga tidak perlu adanya pengakuan secara akuntansi atau pengakuan terhadap *tax effects* atas perbedaan-perbedaan tersebut. Pendapat ini merupakan dukungan terhadap *nonallocation method (flow-through)*.

Di pihak lain kelompok kedua menyatakan perlu adanya alokasi pajak penghasilan atas perbedaan-perbedaan tersebut, dengan argumen-argumen sebagai berikut:

- a. Pajak penghasilan berasal dari transaksi atau kejadian yang terjadi akibatnya, beban pajak penghasilan harus berdasarkan hasil dari transaksi atau kejadian yang dimasukkan dalam laba akuntansi keuangan.
- b. Pajak penghasilan adalah beban dalam melakukan usaha, dan seharusnya dimasukkan konsep akrual, penangguhan dan estimasi yang sama yang diterapkan terhadap beban-beban lainnya.
- c. Perbedaan waktu pengakuan beban dan pendapatan yang berakibat pada perbedaan temporer akan berbalik di masa depan. Perluasan usaha, bisnis yang berkembang sehingga meningkatkan saldo aset dan liabilitas. Aset lama diterima, kewajiban lama dilunasi dan yang baru digantikan. Pajak tangguhan pun bertambah dengan cara yang sama.
- d. Alokasi pajak interperiode membuat *net income* perusahaan lebih berguna sebagai dasar pengukuran *long-term earning power* dan mencegah adanya *periodic* yang berasal dari peraturan pajak penghasilan.
- e. Non-alokasi atas beban pajak penghasilan menyulitkan prediksi arus kas masa depan. Contohnya, arus kas masuk masa depan perusahaan dari pelunasan penjualan kredit biasanya akan dihapuskan oleh arus kas keluar untuk pajak.
- f. *Business entity* diharapkan untuk berkelanjutan dalam *going concern* *basic* dan pajak penghasilan yang kini ditangguhkan akhirnya akan dilunasi.
- g. Pengakuan atas pajak tangguhan diperlukan untuk melaporkan pajak yang di masa depan diharapkan dilunasi atau dipulihkan karena

perlakuan *tax return* untuk berbagai item berbeda dengan perlakuan dalam laporan keuangan.

Pada akhirnya, argumen mengenai alokasi pajak interperiode lah yang lebih tepat. Lalu muncul dua konsep berkenaan dengan masalah pengalokasian itu sendiri. Konsep tersebut adalah *comprehensive basic* dan *partial basic*. Dalam *comprehensive allocation*, beban pajak penghasilan yang dilaporkan dalam satu periode akuntansi dipengaruhi oleh semua transaksi dan kejadian yang termasuk dalam penentuan laba akuntansi sebelum pajak pada periode yang bersangkutan. *comprehensive allocation* berakibat pada penyertaan konsekuensi pajak dari semua perbedaan temporer yang terdapat dalam aktiva dan kewajiban pajak tangguhan.

Sebaliknya, dalam *partial allocation*, beban pajak penghasilan yang dilaporkan dalam periode akuntansi tidak dipengaruhi oleh perbedaan temporer yang diharapkan tidak berbalik di masa depan. Akibatnya, pengakuan pajak penghasilan tangguhan dianggap tidak tepat untuk perbedaan temporer yang pasti akan selalu ada dan akan menimbulkan perbedaan di masa depan yang nantinya akan saling hapus perbedaan yang berbalik, mengakibatkan penundaan yang tidak terbatas dari konsekuensi pajak tangguhan. jadi perbedaan temporer tidak jauh berbeda dengan perbedaan tetap. Selain itu konsep ini juga berpendapat bahwa beban pajak yang dilaporkan pada suatu periode harus sama dengan pajak yang terutang pada periode tersebut.

C. Beban Pajak Tangguhan

Pengakuan pajak penghasilan dalam PSAK No.46, telah menerapkan metode akuntansi pajak penghasilan secara komprehensif dengan pendekatan aktiva kewajiban atau *balance-sheet approach* (Wijayanti:2006). Metode akuntansi pajak penghasilan yang berorientasi pada neraca mengakui kewajiban dan aktiva pajak tangguhan terhadap konsekuensi fiskal masa depan yang disebabkan oleh adanya perbedaan temporer dan sisa kerugian yang belum dikompensasikan. Untuk itu, perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak di masa depan akan diakui sebagai utang pajak tangguhan dan perusahaan harus mengakui adanya biaya pajak tangguhan (*deferred tax expense*), yang berarti bahwa kenaikan utang pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan yang mengakui pendapatan lebih awal atau menunda biaya untuk pelaporan keuangan dibanding pelaporan pajak. Sebaliknya, perbedaan temporer yang dapat mengurangi jumlah pajak dimasa depan akan diakui sebagai aktiva pajak tangguhan dan perusahaan harus mengakui adanya keuntungan atau manfaat pajak tangguhan (*deferred tax benefit*), yang berarti bahwa kenaikan aktiva pajak tangguhan konsisten dengan perusahaan yang mengakui biaya lebih awal atau menangguhkan pendapatannya untuk tujuan pelaporan keuangan dibanding pelaporan pajak (Wijayanti:2006).

Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan fiskal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan dengan yang diperbolehkan menurut peraturan pajak. Yulianti (2005) menyatakan bahwa semakin besar perbedaan antara laba yang dilaporkan perusahaan (laba komersil) dengan laba fiskal menunjukan

"red flag/bendera merah" bagi pengguna laporan keuangan. Hal ini berarti pengguna laporan keuangan harus berhati-hati dalam menggunakan laporan keuangan tersebut dalam pengambilan keputusannya. Semakin besar persentase beban pajak tangguhan terhadap total beban pajak perusahaan menunjukkan pemakaian standar akuntansi yang semakin liberal (Yulianti:2005).

Menurut Phillips, Pincus and Rego (2003) :

"Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak)".

Menurut Zain (2007) dalam Jayanto dan Kiswanto (2009) :

"Pajak Tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh Terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer".

Penyebab perbedaan yang terjadi antara beban pajak penghasilan dengan PPh terutang, dapat dikategorikan dalam dua kelompok berikut ini:

1. Perbedaan Permanen atau Tetap

Perbedaan permanen adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi (ekonomi perusahaan) yang sifatnya permanen atau tetap. Artinya, perbedaan ini tidak akan hilang sejalan dengan waktu. Perbedaan ini tidak akan menimbulkan biaya atau pendapatan pajak tangguhan (*Deferred Tax Expenses* atau *Deferred Tax Income*).

Seperti yang dijelaskan oleh Kieso dan Weygandt dalam buku *Intermediate Accounting* (2007), yaitu:

“Permanent differences are caused by items that (1) enter into pretax financial income but never into taxable income or (2) enter into income but never pretax financial income.”

Perbedaan permanen timbul dari adanya penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final (PPH final), dan adanya *non-deductible expenses*, contohnya penghasilan bunga deposito. Laporan keuangan komersial melaporkannya sebagai penghasilan lain-lain, sedangkan laporan keuangan fiskal tidak memasukkannya dalam perhitungan laba fiskal karena telah dikenakan PPh Final. Selain itu terdapat beberapa jenis beban yang tidak boleh menjadi pengurang oleh Undang-Undang Perpajakan. Sebagai contoh, biaya sumbangan. Di dalam laporan keuangan komersial, biaya sumbangan diakui sebagai pengurang untuk menghitung laba komersial (laba akuntansi). Sedangkan, laporan keuangan fiskal tidak mengakui biaya sumbangan kecuali memenuhi ketentuan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Perbedaan permanen disebabkan oleh adanya pengelompokan penghasilan dan beban oleh peraturan perpajakan. Peraturan perpajakan membagi penghasilan ke dalam dua kelompok yaitu:

- a. Penghasilan yang menjadi objek pajak (*taxable income*)
- b. Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak (*non-taxable income*)

Penghasilan yang menjadi objek pajak (*taxable income*) dibedakan menjadi dua, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final dan penghasilan

yang tidak dikenakan pajak final. Sedangkan pajak membedakan beban menjadi dua, yaitu:

- a. Pengeluaran/beban yang boleh dikurangkan (*deductible expenses*)
- b. Pengeluaran/beban yang tidak boleh dikurangkan (*non-deductible expenses*)

Jenis penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000 pasal 4 ayat (3) yaitu:

- a. 1) Bantuan sumbangan , termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak; 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.

k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat:

1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Sedangkan yang termasuk penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final bagi perusahaan atau badan yaitu:

- a) Bunga deposito/tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- b) Penghasilan bunga dan diskonto dari obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek.
- c) Penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek.
- d) Penghasilan penjualan saham milik perusahaan modal ventura.
- e) Penghasilan usaha
- f) Penghasilan pengalihan hak atas tanah/bangunan bagi yayasan dan organisasi sejenis.
- g) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan/atau bangunan.
- h) Imbalan jasa konstruksi
- i) Penghasilan wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- j) Penghasilan wajib pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran atau penerbangan luar negeri.

k) Penghasilan wajib pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran dalam negeri.

Pengeluaran atau biaya yang tidak boleh dikurangkan yang diatur dan dijelaskan di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000 pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Premi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan pemerintah.
- h. Pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan pajak penghasilan dalam ketentuan ini adalah pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak yang bersangkutan.
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenikmatan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

2. Perbedaan Waktu atau Sementara (Temporer)

Menurut Kieso dan Weygandt dalam *Intermediate Accounting* (2007), perbedaan temporer didefinisikan sebagai berikut:

“A temporary differences is the differences between the tax basis of an asset or liability and it's reported (carrying or book) amount in the financial statements that will result in taxable amounts or deductible amounts in future years, and deductible amounts decrease taxable income in future years.”

Perbedaan temporer ialah perbedaan karena pengakuan pembebanan dalam periode yang berbeda, namun kejadian-kejadian tersebut tetap diakui baik dalam laporan keuangan maupun dalam laporan fiskal tetapi dalam periode yang berbeda. Perbedaan temporer merupakan perbedaan dasar pengenaan pajak (DPP) dari suatu aktiva atau kewajiban, yang menyebabkan laba fiskal bertambah atau berkurang pada periode yang akan datang. Perbedaan temporer disebabkan oleh perbedaan persyaratan waktu item pendapatan dan biaya. Perbedaan sementara setelah beberapa waktu dampaknya akan sama terhadap laba akuntansi maupun laba fiskal.

Perbedaan temporer dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu:

a. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*)

Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (*taxable amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*). Pajak penghasilan yang akan dibayarkan atas jumlah kena pajak di masa depan dilaporkan di neraca sebagai kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*). Apabila nilai tercatat aktiva lebih besar dari pada DPP-ny jumlah manfaat ekonomi kena pajak akan melebihi jumlah uang yang dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. Perbedaan ini merupakan perbedaan temporer kena pajak dan kewajiban pajak penghasilan pada periode mendatang merupakan kewajiban pajak tangguhan. Pada saat perusahaan memulihkan nilai tercatat aktiva, perbedaan temporer kena pajak akan terealisasi menjadi laba fiskal. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak.

- b. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*).

Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*). Manfaat pajak penghasilan (penghematan) yang diharapkan akan terealisasi dari pengurangan di masa depan dilaporkan di neraca sebagai aktiva pajak tangguhan (*deferred tax asset*).

Menurut PSAK No. 46, pengakuan suatu kewajiban mengandung makna bahwa nilai tercatat kewajiban akan diselesaikan pada masa yang akan datang dengan mengandung sumber daya. Pada saat sumber daya tersebut digunakan untuk menyelesaikan kewajiban, sebagian atau seluruh jumlah sumber daya tersebut mungkin dapat dikurangkan dari laba fiskal pada periode setelah pengakuan kewajiban. Dalam hal ini, perbedaan temporer adalah selisih antara nilai tercatat kewajiban dengan DPP-nya. Oleh karena itu timbul aktiva pajak tangguhan berupa pajak penghasilan yang dipulihkan pada masa yang akan datang, yaitu saat bagian dari kewajiban tersebut dapat dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal. Demikian pula halnya, apabila nilai tercatat aktiva lebih rendah daripada DPP-nya, maka selisihnya merupakan aktiva pajak tangguhan berupa pajak penghasilan yang dipulihkan pada masa yang akan datang.

D. Laba

1. Pengertian Laba

Menurut JB. Hicks (2000), "Laba adalah nilai maksimum yang dapat dikonsumsi suatu perusahaan selama periode tertentu dan tetap sejahtera pada akhir periode seperti awal periode."

Menurut committee of terminology: "Laba adalah jumlah yang berasal dari pengurangan pokok produksi, biaya lain dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi."

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa laba merupakan suatu informasi yang dihasilkan dari selisih antara pendapatan dan beban yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan selama periode tertentu.

2. Tujuan Pelaporan Laba

Tujuan utama pelaporan laba adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi mereka yang berkepentingan dalam laporan keuangan. *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC)* no.1 menyatakan bahwa fokus utama dalam pelaporan akuntansi adalah memberikan informasi tentang kinerja perusahaan yang diberikan oleh ukuran laba dan komponen di dalamnya.

Laba merupakan bagian dari pelaporan keuangan sehingga laba seharusnya juga berguna untuk keputusan kredit. Menurut Harahap (2007) laba dapat digunakan untuk menilai perusahaan misalnya untuk:

- a. Mengevaluasi *performance* manajemen
- b. Memprediksi laba yang akan datang
- c. Menilai resiko investasi atau pinjaman

Menurut Hendriksen and Breda, dikutip dalam Yulianti (2005), tujuan khusus pelaporan laba antara lain:

- a. Penggunaan laba sebagai pengukur efisiensi manajemen
- b. Penggunaan angka laba historis untuk membantu meramalkan masa depan perusahaan atau pembagian deviden yang akan datang
- c. Penggunaan laba sebagai pengukuran keberhasilan dan sebagai pedoman pengambilan keputusan manajerial di masa yang akan datang.

E. Manajemen Laba

1. Pengertian Manajemen Laba

Manajemen laba (*earnings management*) merupakan bagian dari Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*). *Positive Accounting Theory* merupakan teori yang membahas mengenai pemilihan prinsip akuntansi oleh manajer dan bagaimana manajer bereaksi atas standar akuntansi yang diajukan (Scott, 2003 dalam Amali, 2009). Dalam perkembangannya, *Positive Accounting Theory* mencoba menjelaskan dan memprediksikan praktik akuntansi yang dilakukan di dalam perusahaan, salah satunya adalah praktik *earnings management*.

Beberapa peneliti terdahulu mengartikan manajemen laba dengan bahasa yang berbeda-beda. Namun demikian pada intinya adalah sama yaitu menentukan laba sedemikian rupa dengan mempermainkan pos-pos pendapatan dan biaya dalam laporan laba rugi baik melalui pemanfaatan pemilihan alternatif metode maupun melalui operasi.

Terdapat tiga hipotesis terkait dengan *positive accounting theory*, yang didasarkan pada pemikiran bahwa manajer akan memilih standar

akuntansi yang paling menguntungkan diri mereka sendiri (Watts dan Zimmerman, 1990). Ketiga Hipotesis tersebut adalah *Bonus Plan Hypothesis*, *Debt Covenant Hypothesis* dan *Political Cost Hypothesis*.

a. *Bonus Plan Hypothesis*

Hipotesis ini menyatakan bahwa manajer perusahaan dengan *Bonus Plan* yang didasarkan pada besarnya laba yang dicapai akan cenderung memilih standar akuntansi yang akan meningkatkan laba tahun berjalan atau melakukan perataan laba (*income smoothing*).

b. *Debt Covenant Hypothesis*

Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan dengan *debt covenant* yang didasarkan pada angka-angka laporan keuangan, akan menghindari kondisi gagal bayar (*default*) dengan cara menggeser laba di masa mendatang untuk dilaporkan sebagai laba tahun berjalan.

c. *Political Cost Hypothesis*

Hipotesis ini menyatakan semakin besar *political cost* yang dihadapi perusahaan apabila melaporkan laba, manajer akan cenderung menunda pengakuan laba. Perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan yang berada dalam industri tertentu memiliki kecenderungan untuk menarik perhatian publik dan pemerintah. Apabila perusahaan-perusahaan ini melaporkan profitabilitas yang tinggi, dapat menimbulkan kebijakan pemerintah baru yang akan mengurangi profitabilitasnya (misalnya kebijakan di bidang pajak). Hal ini mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan kebijakan manajemen laba yang mengurangi laba (*income decreasing earnings management*).

Jenis atau pola manajemen laba yang dipilih oleh manajemen sangat tergantung pada motif atau tujuan manajemen laba itu sendiri (Resmi, 2003 : 114).

Pola manajemen laba dikelompokkan sebagai berikut:

a. *Taking a bath*

Taking a bath dilakukan manajer dengan cara menggeser biaya akrual discretionary periode mendatang ke periode kini dan atau menggeser pendapatan akrual discretionary periode kini ke periode mendatang. Pola ini dilakukan oleh manajer untuk memaksimumkan kompensasi atau bonus yang akan diterimanya pada tahun berikutnya karena menghadapi kenyataan bahwa bonus tahun ini tidak dapat diterima.

b. *Income minimization* (minimisasi laba)

Income minimization dimaksudkan untuk keperluan pertimbangan pajak yaitu meminimumkan kewajiban pajak perusahaan.

c. *Income maximization* (maksimisasi laba)

Income maximization dimaksudkan untuk memaksimumkan bonus manajer, menciptakan kinerja perusahaan yang baik sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (pertimbangan pasar modal), menunda pelanggaran perjanjian utang, dan manajer dapat memperoleh kendali atas perusahaan.

d. *Income smoothing* (perataan laba)

Income smoothing adalah tindakan dimana manajemen memperhalus fluktuasi laba dari periode ke periode dengan cara memindahkan laba dari periode yang memiliki laba tinggi ke periode yang memiliki laba rendah. *Income smoothing* dapat diterapkan untuk setiap tujuan yang dikehendaki tetapi secara tidak ekstrim.

2. Tujuan Melakukan Manajemen Laba

Tujuan dari manajemen laba itu sendiri adalah untuk menyembunyikan kondisi perusahaan yang sesungguhnya dari pemegang saham atau mempengaruhi perjanjian (kontrak) yang dibuat berdasarkan informasi laporan keuangan (Healy dan Wahlen, 1999 dalam Amali, 2009).

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, manajemen laba dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Scott (2003) dalam Amali (2009) menjelaskan setidaknya terdapat enam tujuan yang hendak dicapai manajemen dalam melakukan manajemen laba, yaitu:

a. Bonus

Untuk memaksimalkan bonus yang diterimanya, manajer memiliki motif untuk melakukan manajemen laba secara oportunistis dalam meningkatkan laba perusahaan. Semakin tinggi insentif manajemen yang didasarkan pada laba, semakin besar insentif untuk melakukan manajemen laba.

b. *Debt covenant*

Perusahaan yang menggunakan *debt financing* akan cenderung menghindari pelanggaran atas perjanjian utang karena dapat menimbulkan biaya yang besar bagi perusahaan. Untuk menghindari pelanggaran atas perjanjian utang, perusahaan akan cenderung melakukan manajemen laba.

c. Politis

Pemerintah cenderung menetapkan regulasi, misalnya di bidang perpajakan, bagi perusahaan-perusahaan dalam industri strategis. Regulasi ini dapat berpotensi menambah biaya bagi perusahaan. Oleh karenanya, manajer perusahaan akan cenderung melakukan

manajemen laba untuk menghindari biaya tambahan, seperti pembayaran pajak.

d. Pergantian direksi

Manajemen laba juga dapat dilakukan untuk alasan pergantian direksi, misalnya untuk memaksimalkan bonus yang akan diterima atau menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan angka-angka pada laporan keuangan.

e. *Initial Public Offering* (IPO)

Manajer perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana (IPO) cenderung melakukan manajemen laba dengan harapan dapat meningkatkan harga saham di pasar modal.

f. Mengkomunikasikan informasi

Manajemen laba dapat dilakukan untuk menginformasikan informasi *private* mengenai prospek laba perusahaan kepada investor.

3. Teknik Manajemen Laba

Semakin banyak manajer mendapatkan pengetahuan atau pelatihan mengenai akuntansi, maka semakin mudah bagi manajemen tersebut untuk melakukan praktik akuntansi yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen laba.

Stice (2006) menyatakan teknik-teknik umum yang digunakan dalam manajemen laba yaitu:

a. Penentuan Waktu Transaksi yang Tepat

Teknik ini dilakukan dengan mengatur transaksi yang akan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan pada periode yang tepat atau paling menguntungkan. Ketika terjadi kerugian yang besar atas suatu transaksi, maka dengan sengaja manajer akan

mempercepat transaksi lainnya yang dapat memberikan keuntungan untuk menutup kerugian atas transaksi sebelumnya pada periode yang sama. Sebaliknya, apabila terdapat keuntungan yang besar atas suatu transaksi, maka dengan sengaja manajer akan mempercepat transaksi yang berpotensi merugikan.

b. Perubahan dalam Metode atau Estimasi Akuntansi

Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan fleksibilitas standar akuntansi yang tidak secara tegas menyatakan metode atau estimasi yang harus diterapkan ataupun tidak boleh diterapkan. Perubahan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba misalnya, penilaian biaya persediaan dari LIFO ke FIFO pada periode inflasi. Menurunkan laba dapat dilakukan dengan mengubah metode penyusutan dari garis lurus ke saldo menurun ganda. Selain itu perubahan estimasi akuntansi juga mengakibatkan naik turunnya laba. Misalnya untuk meningkatkan laba, dilakukan perpanjangan umur ekonomi aktiva tetap atau merendahkan persentase jumlah piutang yang tidak dapat ditagih, sehingga jumlah yang dibebankan lebih rendah.

c. Akuntansi Tidak Sesuai Standar

Merupakan teknik manajemen laba dengan melakukan penyimpangan secara sengaja terhadap standar akuntansi. Teknik ini dapat dikatakan sebagai kecurangan dalam pelaporan keuangan. Misalnya melakukan kapitalisasi terhadap beban operasional perusahaan sehingga laba menjadi lebih besar.

d. Transaksi Fiktif

Merupakan teknik manajemen laba yang memanipulasi informasi dengan mengakui transaksi yang sebenarnya tidak terjadi ataupun tidak

mengakui transaksi yang telah terjadi. Hal ini juga dapat dikategorikan sebagai kecurangan, misalnya mengakui penjualan fiktif atau menyembunyikan barang dagangan yang diretur untuk menghindari pengurangan penjualan.

Secara umum, manajemen laba dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, mengubah serta memilih metode akuntansi, dan merekayasa saat transaksi dengan menggeser periode biaya atau pendapatan. Estimasi akuntansi yang dibuat manajemen antara lain estimasi piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, dan lain-lain. Manajemen juga dapat mengubah metode akuntansi dengan syarat alasan serta dampak dari perubahan tersebut dijelaskan. Manajemen dapat memilih berbagai metode akuntansi yang dianggap paling baik bagi manajemen.

F. Pendekatan dalam memprediksi manajemen laba

Holland dan Ramsay (2003) dalam Yulianti (2004) menyebutkan bahwa metodologi yang paling sering digunakan dalam penelitian mengenai manajemen laba adalah dengan mengidentifikasikan kondisi atau keadaan yang menimbulkan insentif manajemen laba. Pemahaman mengenai alasan manajer melakukan manajemen laba akan meningkatkan kekuatan alternatif pengujian yang dipilih untuk meneliti manajemen laba (Mc Nichols, 2000).

1. Penggunaan Distribusi Laba dalam Memprediksi Manajemen Laba

Salah satu pendekatan dalam menentukan perilaku manajemen laba dalam perusahaan adalah dengan menggunakan pendekatan distribusi laba. Pendekatan distribusi laba mengidentifikasi batas pelaporan laba

(*earnings threshold*) dan menemukan bahwa perusahaan yang berada di bawah *earnings threshold* akan berusaha untuk melewati batas tersebut dengan melakukan manajemen laba. Menurut Yulianti (2004) menyatakan patahnya (*kink*) distribusi laba dan perubahan laba sekitar *earnings threshold* dalam distribusi pendapatan yang seharusnya mengikuti pola distribusi normal (memiliki distribusi yang *smooth*). Terpatahnya distribusi tersebut terjadi di sekitar titik laba nol (*zero earnings*) yang disebabkan oleh terlalu sedikitnya perusahaan yang melaporkan kerugian dalam jumlah kecil (*small loss firms*), sebaliknya terlalu banyak perusahaan yang melaporkan keuntungan dalam jumlah kecil (*small profit firms*). Beberapa peneliti memberikan pendapat mengenai penyebab terjadinya abnormalitas distribusi laba sebagaimana dijelaskan diatas. Selain karena laba merupakan perhatian utama investor, Healy (1985) dikutip dalam Yulianti (2004) sebelumnya menyatakan bahwa penyebab manajemen laba adalah adanya kompensasi untuk eksekutif perusahaan yang didasarkan pada pencapaian laba. Hal ini menunjukkan pentingnya pencapaian laba bagi manajemen perusahaan. Hayn (1995) dikutip dalam Yulianti (2004) juga menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki laba hampir di bawah titik nol akan melakukan manipulasi laba untuk membuat mereka melewati “garis merah” tersebut. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Burgstahler dan Dichev (1997) yang kemudian menjelaskan bahwa penyimpangan yang terjadi di sekitar titik nol disebabkan keinginan manajemen untuk menggeser laba dari nilai negatif ke nilai positif.

2. Beban Pajak Tangguhan dalam Mendeteksi Probabilitas Manajemen Laba

Semakin besar perbedaan antara laba yang dilaporkan perusahaan (laba komersial) dengan laba fiskal menunjukkan “bendera merah” bagi pengguna laporan keuangan (Jayanto dan Kiswanto, 2009). Yulianti (2004) menyebutkan bahwa semakin besar persentase beban pajak tangguhan terhadap total beban pajak perusahaan menunjukkan pemakaian standar akuntansi yang semakin liberal. Semakin liberalnya standar akuntansi yang digunakan berarti semakin banyak asumsi dan *judgement* yang mengakibatkan besarnya laba secara akuntansi. Penggunaan asumsi dan *judgement* dapat merupakan suatu usaha manajemen laba oleh manajemen perusahaan.

Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal memiliki hubungan positif dengan insentif pelaporan keuangan seperti *financial distress* dan pemberian bonus, dengan adanya hal tersebut maka dimungkinkan manajer dapat melakukan rekayasa laba atau *Earnings Management* dengan memperbesar atau memperkecil jumlah beban pajak tangguhan yang diakui di dalam laporan laba rugi. Beban yang besar akan menurunkan tingkat laba yang diperoleh suatu perusahaan, begitu pula sebaliknya beban yang sedikit akan menaikkan tingkat laba yang diperoleh perusahaan. Dari penjelasan di atas, beban pajak tangguhan yang timbul dapat dijadikan indikator usaha manajemen laba dengan menaikkan atau menurunkan jumlah beban pajak tangguhan yang diakui di dalam laporan laba rugi.

Wiryandari dan Yulianti (2009) mengatakan bahwa secara spesifik sistem perpajakan dirancang untuk meningkatkan pendapatan negara,

sebaliknya sistem akuntansi dirancang untuk menyediakan informasi tentang kinerja perusahaan dan diharapkan dapat menekan asimetris informasi yang mungkin terjadi antara manajemen sebagai pihak internal dan pengguna laporan keuangan sebagai pihak eksternal.

Perbedaan yang timbul antara akuntansi pajak dan komersial dapat menyediakan informasi tambahan bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kualitas *current earnings* (Phillips, Pincus dan Rego, 2003). Alasannya, karena peraturan perpajakan lebih membatasi keleluasaan penggunaan diskresi dalam menghitung penghasilan kena pajak, itulah sebabnya selisih laba komersial dan laba fiskal (*book-tax gap*) dapat menginformasikan tentang diskresi manajemen dalam proses akrual.

Yulianti (2005) dan Phillips, Pincus, and Rego (2003) menggunakan beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) dan akrual untuk mendeteksi manajemen laba. Yulianti (2005) dan Philips, Pincus and Rego (2003) menduga perusahaan yang tergolong *small profit firm* melakukan manajemen laba dengan tujuan melewati batas pelaporan laba agar tidak melaporkan angka rugi. Semakin besar perbedaan antara laba fiskal dan laba komersial menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen, besarnya diskresi manajemen akan terefleksikan dalam beban pajak tangguhan. Dengan demikian semakin besar nilai beban pajak tangguhan menunjukkan semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan manajemen laba.

G. Penelitian Terdahulu

Berikut hasil dari beberapa penelitian sejenis yang dapat dijadikan bahan kajian yang berkaitan dengan manajemen laba, antara lain:

i. Phillips, Pincus, and Rego (2003)

Penelitian Phillips, Pincus, and Rego yang berjudul *“Earnings Management: New Evidence Based on Deferred Tax Expense”* yang meneliti perusahaan manufaktur selama periode tahun 1994 sampai tahun 2000, menyimpulkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh secara signifikan dapat mendeteksi manajemen laba.

ii. Yulianti (2005)

Penelitian yang berjudul “Kemampuan Beban Pajak Tangguhan dalam Mendeteksi Manajemen Laba” yang meneliti perusahaan yang terdaftar di BEJ selama periode tahun 1999 sampai tahun 2002, menyimpulkan bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba. Dari kesimpulan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa semakin besar beban pajak tangguhan, maka semakin besar pula perusahaan melakukan manajemen laba.

iii. Satwika dan Damayanti (2005)

Penelitian Satwika dan Damayanti yang berjudul “Deteksi Manajemen Laba melalui Beban Pajak Tangguhan” meneliti perusahaan yang terdaftar di BEJ selama tahun 2000 sampai 2002 sebanyak 62 perusahaan, menyimpulkan bahwa beban pajak tangguhan dan akrual secara signifikan tidak berpengaruh dalam mendeteksi manajemen laba.

iv. Wiryandari dan Yulianti (2009)

Penelitian Wiryandari dan Yulianti yang berjudul “Hubungan Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Pajak dengan Perilaku Manajemen Laba dan Persistensi Laba” dengan menggunakan sampel sebanyak 161 perusahaan yang tergabung dalam industri manufaktur, jasa dan retail

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2001 sampai tahun 2006, hasil penelitian ini menemukan bahwa Beban Pajak Tangguhan dan Akrua secara signifikan tidak dapat digunakan untuk mendeteksi manajemen laba.

v. Jayanto dan Kiswanto (2009)

Penelitian yang dilakukan oleh Jayanto dan Kiswanto (2009) yang berjudul "*Deferred Tax Expense And Accruals Dalam Memprediksi Earning Management* (Penelitian Empiris pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia) dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur selama 8 (delapan) periode yaitu mulai tahun 2000 sampai 2007, disimpulkan bahwa Beban Pajak Tangguhan dan akrual tidak berpengaruh secara signifikan untuk mendeteksi manajemen.

Tabel 2.1
Matriks Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel, sampel, dan alat uji	Hasil
1.	Phillips, Pincus, & Rego (2003)	<i>Earnings Management : New Evidence Based on Deffered Tax Expense.</i>	Variabel : 1. Manajemen laba (Y) 2. Beban Pajak Tangguhan (X1) 3. Akrua (X2) 4. Klasifikasi Industri (X3) Sampel : 2.179 Perusahaan industri. Alat Uji : Pooled Regression.	Beban pajak tangguhan dan akrual berpengaruh secara signifikan dapat mendeteksi manajemen laba.
2.	Yulianti (2005)	Kemampuan Beban Pajak Tangguhan dalam Mendeteksi Manajemen	Variabel : 1. Manajemen Laba (Y) 2. Beban Pajak Tangguhan (X1) 3. Akrua (X2)	Beban pajak tangguhan dan akrual signifikan, dan mempunyai hubungan positif terhadap

		Laba.	4. Klasifikasi Perusahaan (X3) Sampel : 446 Perusahaan yang terdaftar di BEJ. Alat Uji : Regresi Logistik.	probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba.
3.	Satwika dan Damayanti (2005)	Deteksi Manajemen Laba melalui Beban Pajak Tangguhan.	Variabel : 1. Manajemen Laba (Y) 2. Beban pajak tangguhan (X1) 3. Akrua (X2) Sampel : 62 Perusahaan yang terdaftar di BEJ. Alat Uji : Regresi Logistik.	Beban pajak tangguhan dan akrual secara signifikan tidak berpengaruh dalam mendeteksi manajemen laba.
4.	Wiryandari dan Yulianti (2009)	Hubungan Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Pajak dengan Perilaku Manajemen Laba dan Persistensi Laba.	Variabel : 1. Laba sebelum pajak tahun depan (Y) 2. LPBTD (X1) 3. Laba sebelum pajak tahun berjalan (X2) Sampel : 161 Perusahaan manufaktur, jasa, ritel. Alat Uji : Regresi linier berganda.	Beban pajak tangguhan dan akrual secara signifikan tidak dapat digunakan dalam mendeteksi manajemen laba.
5.	Jayanto dan Kiswanto (2009)	<i>Deferred Tax and Accruals</i> dalam memprediksi <i>Earnings Managements</i> (Penelitian Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI).	Variabel : 1. Manajemen laba (Y) 2. Beban pajak tangguhan (X1) 3. Akrua (X2) Sampel : Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Alat Uji : Regresi Logistik.	Beban pajak tangguhan dan akrual secara signifikan tidak berpengaruh dalam mendeteksi manajemen laba.

H. Hipotesis

H0 = Tidak ada pengaruh signifikan antara Beban Pajak Tangguhan terhadap probabilitas dalam melakukan manajemen laba.

H1 = Ada pengaruh signifikan Beban Pajak Tangguhan terhadap probabilitas dalam melakukan manajemen laba.

H2 = Semakin tinggi Beban Pajak Tangguhan maka semakin besar probabilitas dalam melakukan manajemen laba.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Definisi Operasional Variabel

Konsep dasar dari definisi operasional mencakup pengertian untuk mendapatkan data yang akan dianalisis dengan tujuan untuk mengoperasionalkan konsep-konsep penelitian menjadi variabel penelitian serta cara pengukurannya. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Independen (X)

Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak), dimana laba akuntansi cenderung lebih besar dari laba fiskal.

b. Variabel Dependen (Y)

Manajemen Laba adalah pelaporan keuangan oleh manajemen untuk pihak eksternal yang di dalamnya mengandung tindakan intervensi yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi untuk *stockholder* atau manajer.

2. Pengukuran Variabel

a. Variabel Independen (X)

Beban pajak tangguhan diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Beban Pajak Tangguhan}_{it}}{\text{Total Asset}_{t-1}}$$

b. Variabel Dependen (Y)

Manajemen laba dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy* dan dibagi ke dalam dua kategori.. Diberi kode 1 jika perusahaan berada dalam *range small profit firms* pada *range* 0 s/d 0,06, dan diberi kode 0 jika perusahaan berada dalam *range small loss firm* pada *range* -0,09 s/d 0.

Untuk menentukan perusahaan berada dalam *range small profit* atau *small loss firms* dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Scaled Earning Changes } it = \frac{\text{Net Income } it - \text{Net Income } i(t-1)}{\text{Market Value Equity } i(t-1)}$$

Market Value Equity diukur dengan formula sbb:

$$MVE \ i(t-1) = \text{Saham yang Beredar} \times \text{Harga Saham}$$

Skala data nominal.

B. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

Adapun teknik penentuan populasi dan sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:

- c. Populasi adalah perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahunan (*annually report*) yang diaudit dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- d. Sampel adalah kelompok perusahaan manufaktur yang kemudian pemilihannya akan dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perusahaan melaporkan laporan keuangan yang diaudit dari tahun 2008 sampai tahun 2010 mempublikasikan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir dan Per 31 Desember.
2. Perusahaan tidak di-*delisting* selama periode pengamatan.
3. Perusahaan melaporkan beban pajak tangguhan pada tahun-tahun tertentu, yaitu antara tahun 2008-2010.
4. Perusahaan melaporkan laporan keuangan dalam satuan mata uang Rupiah (IDR).

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis data:

Untuk keperluan penelitian ini digunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau diperoleh tidak langsung dari sumber pertama dalam bentuk sudah jadi yang bersifat dokumenter. Data tersebut berupa laporan keuangan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008 sampai tahun 2010.

i. Sumber data:

Data yang didapat diambil dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

ii. Pengumpulan data:

Dalam membuat penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Riset Kepustakaan (*Library Research*)

Riset kepustakaan adalah riset dengan mengumpulkan bahan atau data-data yang ada kaitannya dengan objek pembahasan, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah buku-buku, jurnal akuntansi. Riset kepustakaan juga mempelajari literatur-literatur serta membaca catatan perkuliahan yang berhubungan permasalahan untuk mendapatkan teori, definisi, dan analisa yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Melakukan pengumpulan data dengan cara menggandakan data yang ada atau dengan cara membuat salinan.

D. Teknik Analisis

Teknik analisis menggunakan statistik deskriptif dan metode regresi logistik. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang bersifat kuantitatif menjadi data kualitatif guna memberikan kemudahan dalam menginterpretasikannya.

Pengujian hipotesis dilakukan secara *multivariate* dengan menggunakan regresi logistik. Regresi logistik digunakan dalam penelitian ini karena variabel bebasnya kombinasi antara metrik dan nominal (non-metrik). Selain itu, variabel dependennya merupakan variabel *dummy*.

Regresi logistik digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel beban pajak tangguhan mempengaruhi dalam mendeteksi manajemen laba. Dalam teknik analisis, tidak perlu melakukan uji normalitas data karena regresi logistik tidak memerlukan asumsi normalitas pada variabel bebasnya. Asumsi

multivariate normal distribution tidak dapat dipenuhi karena variabel bebasnya merupakan campuran antara kontinyu (metrik) dan kategorikal (nonmetrik).

Model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

$$\text{Ln} \frac{EM}{1-EM} = \alpha + \beta \text{DTEit} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

$\text{Ln} \frac{EM}{1-EM}$ = Variabel *dummy* kategori manajemen laba.

Kode 1 jika perusahaan berada dalam *range small profit firm* dan kode 0 jika perusahaan berada dalam *range small loss firm*.

DTEit = *Deferred Tax Expense* (Beban Pajak Tangguhan) perusahaan i pada tahun t dibagi dengan *Total Asset* pada akhir tahun t-

ε_{it} = *error term*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Seleksi Sampel

Proses seleksi sampel menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun proses seleksi sampel yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Proses Seleksi Sampel

Keterangan	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.	170
Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan yang diaudit selama periode pengamatan.	(54)
Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan dalam satuan mata uang Rupiah (IDR).	(3)
Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data yaitu perusahaan yang tidak melaporkan beban pajak tangguhan.	(73)
Total perusahaan yang dijadikan sampel	40

Sumber : Bursa Efek Indonesia

Tabel 4.2
Daftar Perusahaan yang Menjadi Objek Penelitian

No.	Nama Perusahaan	Kode
1	Ades Waters Indonesia Tbk	ADES
2	Adhi Karya (Persero)	ADHI
3	Akbar Indo Makmur Stimec, Tbk	AIMS
4	Asiaplast Industries, Tbk	APLI
5	Astra Graphia, Tbk	ASGR
6	Asia National Resources, Tbk	ASIA
7	Astra International , Tbk	ASII
8	Sepatu Bata, Tbk	BATA
9	Primarindo Asia Infrastructure, Tbk	BIMA
10	Barito Pacific, Tbk	BRPT
11	Bakrie Telecom, Tbk	BTEL
12	Budi Acid Jaya, Tbk	BUDI
13	Cahaya Kalbar, Tbk	CEKA
14	Citra Kebun Raya Agri, Tbk	CTRA
15	Dynaplast, Tbk	DYNA
16	Ekadharma International, Tbk	EKAD
17	FKS Multi Agro, Tbk	FISH
18	Mobile 8 – Telecom, Tbk	FREN
19	Gajah Tunggal, Tbk	GJTL
20	Gowa Makassar Tourism Development, Tbk	GMTD
21	Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk	HMSP
22	Jaya Pari Steel, Tbk	JPRS
23	Kedaung Setia Industrial, Tbk	KDSI
24	Kedaung Indah Can, Tbk	KICI
25	Langgeng Makmur Industri, Tbk	LMPI
26	Multistrada Arah Saran, Tbk	MASA
27	Modern International, Tbk	MDRN
28	Nipress, Tbk	NIPS
29	Pan Brothers, Tbk	PBRX
30	Pioneerindo Gourmet International, Tbk	PTSP
31	Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas, Tbk	SAIP
32	Sekawan Inti Pratama, Tbk	SIAP
33	Sierad Produce, Tbk	SIPD
34	Sinarmas Agro Resources and Technology, Tbk	SMAR
35	Holcim Indonesia, Tbk	SMCB
36	Suparma, Tbk	SPMA
37	Tigaraksa Satria, Tbk	TGKA
38	Tira Austenite, Tbk	TIRA

No.	Nama Perusahaan	Kode
39	Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk	ULTJ
40	Unilever Indonesia, Tbk	UNVR

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Beban Pajak Tangguhan

Beban Pajak Tangguhan diperoleh dengan membagi antara beban pajak tangguhan dengan total aset akhir tahun. Besarnya beban pajak tangguhan pada 40 perusahaan manufaktur yang menjadi sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Beban Pajak Tangguhan

PERUSAHAAN (i)	BEBAN PAJAK TANGGUHAN(t)/ASET(t-1)		
	2008	2009	2010
ADES	0.008486191	0.005804935	0.0101022
ADHI	-	0.002353347	0.000376468
AIMS	0.000157892	0.000965972	-
APLI	0.009773129	0.056765474	0.000422197
ASGR	-	0.003453599	0.002735293
ASIA	0.079145056	0.069596008	0.056438873
ASII	0.01331864	0.000941293	-
BATA	0.02177531	0.002286083	0.006828321
BIMA	-	0.176774655	0.035328194
BRPT	-	0.009045205	0.04610924
BTEL	0.008842662	0.020479114	0.04767106
BUDI	0.007435124	0.007414864	0.012736862
CEKA	0.002080602	0.006224	0.002396084
CTRA	0.00007	-	0,0000026095
DYNA	-	0.009270742	0.000788669
EKAD	0.005057241	-	0.000765136
FISH	-	0.00045908	0.000451579
FREN	-	0.010345343	0.00789791
GJTL	-	0.017759678	0.002562535
GMTD	0.001212108	0.003155899	-
HMSP	-	0.000177515	0.000727008
JPRS	-	0.000781479	0.010442288
KDSI	0.00251308	0.002858997	-
KICI	0.04564109	0.014827156	0.008663722

PERUSAHAAN (i)	BEBAN PAJAK TANGGUHAN(t)/ASET(t-1)		
	2008	2009	2010
LMPI	0.002860563	0.003372485	-
MASA	0.000728917	0.001146268	0.000613554
MDRN	0.009528648	0.003825555	-
NIPS	-	0.00258347	0.001205395
PBRX	0.000487095	0.0001616	-
PTSP	0.009876404	0.009691462	0.014138574
SAIP	-	0.046012409	0.001034708
SIAP	0.005982728	0.002967028	-
SIPD	0.012979646	0.012997345	0.008521267
SMAR	0.00272267	-	0.002047187
SMCB	0.00294704	0.010751268	0.001988338
SPMA	0.003415274	0.027246918	0.025467097
TGKA	-	0.033589209	0.021326971
TIRA	0.01252846	0.001864233	-
ULTJ	-	0.010994703	0.025495494
UNVR	0.002294594	0.008076423	0.003030999

Sumber : Hasil olah data

Berdasarkan Tabel 4.3. di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 nilai beban pajak tangguhan (*Deferred Tax Expense / DTE*) tertinggi berada pada PT.Asia National Resources, Tbk (ASIA) sebesar 0.079145056. Tahun 2009 nilai tertinggi terdapat pada PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk (BIMA) yaitu sebesar 0.176774655. Sedangkan untuk tahun 2010 nilai tertinggi kembali berada pada PT. Asia National Resources, Tbk (ASIA) yaitu sebesar 0.056438873.

Untuk nilai terendah pada tahun 2008 berada pada PT. Citra Kebun Raya Agri, Tbk (CTRA) yaitu sebesar 0.00007. Untuk tahun 2009 nilai terendah berada pada PT. Pan Brothers, Tbk (PBRX) sebesar 0.0001616. Sedangkan pada tahun 2010 nilai terendah kembali berada pada PT. Citra Kebun Raya Agri, Tbk (CTRA) yaitu sebesar 0,0000026095.

Dalam tabel 4.3. diatas, terdapat cukup banyak perusahaan dalam beberapa tahun yang diberi tanda (-). Hal ini menunjukkan bahwa dalam tahun

tersebut banyak perusahaan yang melaporkan laba akuntansi lebih rendah dari laba fiskal, sehingga pada tahun tersebut tidak terdapat beban pajak tangguhan melainkan manfaat pajak tangguhan.

2. Manajemen Laba

Manajemen Laba (*Earnings Management*) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Dibagi atas dua kategori batas pelaporan laba (*earnings threshold*) yaitu *small profit firms* dan *small loss firms*. Kategori perusahaan yang termasuk dalam kelompok *small profit firms* diberi nilai *dummy* 1 dan kategori perusahaan yang termasuk dalam kelompok *small loss firms* diberi nilai *dummy* 0.

Klasifikasi manajemen laba yang dikelompokkan kedalam dua kategori sebanyak 40 perusahaan manufaktur yang menjadi sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Manajemen Laba

No.	Kode	Manajemen Laba		
		2008	2009	2010
1	ADES	1	1	1
2	ADHI	-	1	1
3	AIMS	1	0	-
4	APLI	0	1	0
5	ASGR	-	1	1
6	ASIA	1	0	0
7	ASII	1	1	-
8	BATA	1	0	1
9	BIMA	-	1	0
10	BRPT	-	1	0
11	BTEL	0	0	0
12	BUDI	0	1	0
13	CEKA	1	1	0
14	CTRA	1	-	1

No.	Kode	Manajemen Laba		
		2008	2009	2010
15	DYNA	-	1	1
16	EKAD	1	-	1
17	FISH	-	1	1
18	FREN	-	1	0
19	GJTL	-	1	0
20	GMTD	1	1	-
21	HMSP	-	1	1
22	JPRS	-	0	1
23	KDSI	0	1	-
24	KICI	0	0	1
25	LMPI	0	1	-
26	MASA	0	1	1
27	MDRN	1	1	-
28	NIPS	-	1	1
29	PBRX	0	1	-
30	PTSP	1	1	1
31	SAIP	-	1	0
32	SIAP	1	0	-
33	SIPD	1	1	1
34	SMAR	1	-	1
35	SMCB	1	1	0
36	SPMA	0	1	1
37	TGKA	-	0	1
38	TIRA	0	1	-
39	ULTJ	-	0	1
40	UNVR	1	1	1

Sumber : hasil olah data

C. Statistik Deskriptif

Tabel 4.5
Descriptive Statistic
Small Loss Firms

	N	Mean	Std. Deviation
BPT	30	0.015086577	0.019245937
Valid N (listwise)	30		

Sumber : Hasil olah data

Tabel 4.6
Descriptive Statistic
Small Profit Firms

	N	Mean	Std. Deviation
BPT	64	0.012054552	0.025722061
Valid N (listwise)	64		

Sumber : Hasil olah data

Berdasarkan tabel 4.5. untuk perusahaan yang termasuk kedalam kelompok *small loss firms* dapat dilihat bahwa nilai N berjumlah 30. sedangkan pada tabel 4.6. untuk perusahaan yang termasuk kedalam kelompok *small profit firms* nilai N berjumlah 64. Hal ini menunjukkan jumlah sampel sebanyak 40 perusahaan dengan waktu pengamatan selama 3 tahun sehingga jumlah observasi menjadi 94.

Dalam tabel 4.5. dapat dilihat bahwa statistik deskriptif kelompok *small loss firms* nilai rata-rata (*mean*) untuk beban pajak tangguhan (*Deferred Tax Expense*) bernilai 0.015086577 atau 1,508% dari total aset akhir tahun dengan standar deviasi sebesar 0.019245937. Untuk tabel 4.6. menyajikan statistik deskriptif kelompok *small profit firms*, table tersebut menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) dari beban pajak tangguhan (*Deferred Tax Expense*) sebesar 0.012054552 atau 1,205% dari total aset akhir tahun dengan standar deviasi sebesar 0.025722061.

Sebagaimana terlihat dalam tabel di atas yaitu Tabel 4.5. dan 4.6. Secara rata-rata nilai beban pajak tangguhan (*Deferred Tax Expense/DTE*) untuk *small loss firms* dan *small profit firms* bernilai positif yang berarti bahwa perusahaan-perusahaan ini secara rata-rata melaporkan Beban pajak tangguhan (*Deferred Tax Expense*). Nilai rata-rata (*mean*) dari Beban Pajak Tangguhan pada *small loss firms* (0.015086577) lebih tinggi dibandingkan rata-rata *small profit firms* (0.012054552).

D. Analisis Regresi Logistik

1. Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow's of Fit Test* lebih besar daripada 0,05 maka hipotesis nol diterima atau menolak hipotesis H1, yang berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan bahwa model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya untuk memprediksi populasi sehingga model yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengambilan kesimpulan berdasarkan kajian penelitian.

Tabel 4.7

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	6,159	8	,629

Sumber : SPSS (diolah)

Dari hasil pengujian pada tabel 4.9 di atas diperoleh nilai *Chi Square* sebesar 6,159 dengan nilai Sig. (peluang) sebesar 0,629. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai Sig lebih besar daripada taraf signifikansi alpha 5% (0,05) yang berarti keputusan yang diambil adalah menerima H0 yang berarti tidak ada perbedaan antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. Itu berarti model regresi logistik bisa digunakan untuk analisis selanjutnya dalam memprediksi populasi berdasarkan data sampel kemudian digunakan untuk pengambilan kesimpulan.

2. Uji Model Fit

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 *Log Likelihood* (-2LL) pada blok pertama (Block Number = 0) dengan nilai -2 *Log*

likelihood (-2LL) pada blok kedua (Block Number = 1). Adanya penurunan nilai antara -2LL pertama (initial -2LL function) dengan nilai -2LL pada langkah berikutnya (-2LL kedua) menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data.

Tabel 4.8

Iteration History^{a,b,c}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 1		117,755	,723
0	2	117,731	,757
	3	117,731	,758

- a. Constant is included in the model.
- b. Initial -2 Log Likelihood: 117,731
- c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber : SPSS (diolah)

Tabel 4.9

Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients	
			Constant	Variable X
Step 1		117,294	,799	-5,812
1	2	117,264	,842	-6,233
	3	117,264	,842	-6,237
	4	117,264	,842	-6,237

- a. Method: Enter
- b. Constant is included in the model.
- c. Initial -2 Log Likelihood: 117,731
- d. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber : SPSS (diolah)

Tabel 4.8 dan 4.9 menunjukkan perbandingan antara nilai -2LL blok pertama dengan -2LL blok kedua. Dari hasil perhitungan nilai -2LL terlihat

bahwa nilai blok pertama (Block Number=0) adalah 117,731 dan nilai -2LL pada blok kedua (Block Number=1) adalah sebesar 117,264. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi kedua lebih baik.

3. Model Summary

Model summary sama dengan pengujian R^2 pada persamaan regresi linear. Dengan tujuan mengetahui seberapa besar kombinasi variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 4.10

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	117,264 ^a	,005	,007

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

Sumber : SPSS (diolah)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa nilai R^2 sebesar 0,007 atau 0,7%, yang artinya variabel X (beban pajak tangguhan) mempengaruhi variabel Y (manajemen laba) sebesar 0,7%. Selebihnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel-variabel yang diteliti. Dapat juga dikatakan bahwa kemampuan variabel X (beban pajak tangguhan) mampu menjelaskan variabel Y (manajemen laba) sebesar 0,007 atau 0,7%. Untuk selebihnya sekitar 99,3% variabel Y dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang belum dikaji dalam penelitian ini.

4. Hasil Pengujian Secara Parsial

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi logistik (*logistic regression*) untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel independen terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan SPSS versi 20.00 menghasilkan output sebagai berikut:

Tabel 4.11

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1	Variable_X	-6,237	9,107	,469	1	,493	,002
	Constant	,842	,255	10,902	1	,001	2,321

a. Variable(s) entered on step 1: Variable_X.

Sumber : SPSS (diolah)

Dari tabel uji regresi logistik di atas maka diperoleh persamaan regresi logistic sebagai berikut:

$$\ln \frac{EM}{1-EM} = \alpha + \beta DTEit + \varepsilon it$$

$$\ln \frac{EM}{1-EM} = 0,842 - 6,237 + \varepsilon it$$

Dari persamaan di atas dapat kita lihat nilai konstanta sebesar 0,842. Hal ini menunjukkan bahwa apabila semua variabel independen bernilai 0, maka probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba sebesar 0,699 atau 69,9%.

Dengan menghitung nilai probabilitas sebagai berikut:

$$\ln \frac{EM}{1-EM} = \frac{\varepsilon 0,842}{1 + \varepsilon 0,842} = \frac{2,320}{3,320} = 0,699 \text{ atau } 69,9\%$$

$$\varepsilon = 2,718$$

Beban Pajak Tangguhan (*Deferred tax expenses*) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar -6,237. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan sebesar Rp. 1 beban pajak tangguhan, maka akan menurunkan probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba sebesar 6,237 dengan asumsi bahwa nilai variabel lain tetap. Sebaliknya apabila beban pajak tangguhan berkurang Rp.1, maka akan menaikkan probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba sebesar 6,237.

Berdasarkan hasil tabel 4.14 di atas, statistik *Wald* untuk variabel beban pajak tangguhan (*Deferred Tax Expense*) adalah sebesar 0,469, sedangkan dari tabel *Chi Square* untuk tingkat signifikan 5% atau 0,05 dan derajat bebas = 1 diperoleh

hasil 3,8415. Dapat disimpulkan bahwa beban pajak tangguhan (*Deferred Tax Expense*) tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba.

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa beban pajak tangguhan (*Deferred Tax Expense*) tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas perusahaan dalam melakukan manajemen laba (*Earnings Management*). Hasil ini menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan tidak dapat dijadikan indikator dalam mendeteksi manajemen laba atau menolak hipotesis (H1) yang menyatakan ada pengaruh signifikan Beban Pajak Tangguhan terhadap probabilitas dalam melakukan manajemen laba, dan secara bersamaan menolak hipotesis (H2) yang mengatakan semakin tinggi Beban Pajak Tangguhan maka semakin besar probabilitas dalam melakukan manajemen laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan Satwika dan Damayanti (2005), Wiryandari dan Yulianti (2009), Jayanto dan Kiswanto (2009) maka asumsi yang terbangun ialah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak lagi menjadikan beban pajak tangguhan sebagai dasar melakukan manajemen laba.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :
Beban pajak tangguhan (Deffered tax expense) tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba. Menolak hipotesis yang mengatakan bahwa ada pengaruh signifikan Beban Pajak Tangguhan terhadap probabilitas dalam melakukan manajemen laba.

Peningkatan beban pajak tangguhan (deffered tax expense) tidak mempengaruhi peningkatan probabilitas dalam melakukan manajemen laba. Menolak hipotesis yang mengatakan bahwa semakin tinggi Beban Pajak Tangguhan maka semakin besar probabilitas dalam melakukan manajemen laba.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

Penelitian ini dapat diperluas dengan menambah variabel independen yang diduga berpengaruh dalam mendeteksi manajemen laba.

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya memperpanjang interval tahun penelitiannya, misalnya jangka waktu lima tahun.

Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas atau menambah sampel dari seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga tidak hanya meneliti pada perusahaan manufaktur saja.

Keterbatasan

Penelitian ini disadari bahwa terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasilnya. Keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:

Sampel penelitian ini hanya meneliti perusahaan-perusahaan yang bergerak pada industri manufaktur saja sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digunakan sebagai dasar generalisasi.

Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya selama 3 tahun yaitu dari tahun 2008-2010. Diharapkan penelitian berikutnya dapat memperluas atau menambah sampel penelitian dari seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan yang lebih panjang.

Variabel independen hanya satu, yaitu beban pajak tangguhan sehingga lingkup penelitian hanya mencari hubungan antara beban pajak tangguhan dan probabilitas manajemen laba saja.

DAFTAR PUSTAKA

Amali, Muhammad Na'im, 2009, "Kemampuan *Deferred Tax Expenses* Mendeteksi *Earnings Management* Perusahaan". **Indonesian Tax Review**.

Harahap, Sofyan Syafri, 2007, **Teori Akuntansi**. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hidayati, Siti Munfiah dan Zulaikha, 2003, "Analisis Perilaku *Earning Management*: Motivasi Minimalisasi *Income Tax*". **Simposium Nasional Akuntansi VI**. Surabaya.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, **Standar Akuntansi Keuangan**. Jakarta: Salemba Empat.

Jayanto, Prabowo Yud dan Kiswanto, 2009, "*Deferred Tax And Accruals* Dalam Memprediksi *Earning Management* (Penelitian Empiris pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia)". **Simposium Nasional Perpajakan**.

Kieso, Donald G., and Jerry J.Weygandt, 2007, *Intermediate Accounting*, 12th Edition. **John willey & Sons, Inc.**

Phillips, John., M. Pincus and S. Rego, 2003, "*Earnings Management: New Evidence Based on Deferred Tax Expense*". **The Accounting Review**, vol 78 (2003), pp.491 – 521.

Rahayu, Siti Kurnia, 2010, *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Resmi, Siti, 2003, Penerapan Manajemen Laba Dalam Perpajakan. **Kajian Bisnis STIE Widya Wiwahana Yogyakarta** No. 29, hal 111-125.

Resmi, Siti, 2008, **Perpajakan: Teori dan Kasus**, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Satwika, Anisa dan Damayanti, Theresia Woro, 2005, "Deteksi Manajemen Laba melalui Beban Pajak Tangguhan". **Jurnal Ekonomi dan Bisnis**, Vol. XI, No.2, (2005) : 101-118.

Stice, Earl K., James D. Stice and K. Fred Skousen, 2006, **Akuntansi Intermediate**, Edisi 16. Jakarta: Salemba Empat.

Suranggane, Zulaikha, 2007, "Analisis Aktiva Pajak Tangguhan Dan Akrua Sebagai Prediktor Manajemen Laba: Kajian Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI". **Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia**, vol. 2, No. 1, (2007) : 77-94.

Waluyo, 2007, **Perpajakan Indonesia**, Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.

Watts, Ross L., dan J.L. Zimmerman, "*Positive Accounting Theory: Ten Years Perspective*". **The Accounting Review**, Vol. 3, 1999.

Wijayanti, Handayani Tri, 2006, " Analisis Perbedaan Antara Laba Akuntansi dan Laba Fiskal Terhadap Persistensi Laba, Akrua, dan Arus Kas". **Simposium Nasional Akuntansi IX**. Padang.

Wiryandari, Santi Aryn dan Yulianti, 2009, "Hubungan Perbedaan Laba Akuntansi Dan Laba Pajak Dengan Perilaku Manajemen Laba Dan Persistensi Laba". **Simposium Nasional Akuntansi XII**. Palembang.

Yulianti, 2004, "Kemampuan Beban Pajak Tangguhan Dalam Mendeteksi Manajemen Laba". **Tesis**. Depok: Universitas Indonesia.

Yulianti, 2005, "Kemampuan Beban Pajak Tangguhan Dalam Mendeteksi Manajemen Laba". **Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia**, vol. 2, No. 1, (2005) : 107-129.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.

www.duniainvestasi.com

www.google.com

www.idx.co.id

LAMPIRAN

BEBAN PAJAK TANGGUHAN

No.	PERUSAHAAN	BEBAN PAJAK TANGGUHAN		
		2008	2009	2010
1	ADES	1,517,000,000	1,074,000,000	1,801,000,000
2	ADHI		12,061,771,384	2,119,307,656
3	AIMS	6,078,686	78,530,983	
4	APLI	2,885,359,074	15,671,963,865	127,664,428
5	ASGR		2,904,664,211	2,119,460,360
6	ASIA	5,528,067,185	4,411,967,520	4,227,622,390
7	ASII	846,000,000,000	76,000,000,000	
8	BATA	7,231,150,000	918,778,000	2,845,219,000
9	BIMA		18,997,819,572	3,351,969,152
10	BRPT		155,973,000,000	755,052,000,000
11	BTEL	41,243,624,607	47,272,312,726	82,557,183,490
12	BUDI	11,046,000,000	12,596,000,000	20,364,000,000
13	CEKA	1,276,822,935	4,266,833,311	1,361,845,480
14	CTRA	497,568,952		22,322,078
15	DYNA		11,449,406,272	1,017,849,225
16	EKAD	429,492,351		126,341,201
17	FISH		189,765,648	251,703,690
18	FREN		49,263,844,389	37,569,842,843
19	GJTL		154,750,000,000	22,748,000,000
20	GMTD	337,624,589	905,870,485	
21	HMSP		2,864,000,000	12,880,000,000
22	JPRS		312,078,677	3,696,058,492
23	KDSI	1,362,239,864	1,388,677,160	
24	KICI	3,663,246,646	1,278,370,940	730,151,405
25	LMPI	1,521,122,566	1,888,855,382	
26	MASA	1,311,447,149	2,727,000,000	1,556,000,000
27	MDRN	8,671,878,089	3,025,412,332	
28	NIPS		839,648,790	379,070,070
29	PBRX	405,795,251	153,963,021	
30	PTSP	730,941,557	792,327,959	1,281,905,704
31	SAIP		116,109,295,497	2,497,477,399
32	SIAP	575,790,133	421,959,364	
33	SIPD	16,805,692,651	18,001,221,139	13,985,913,917
34	SMAR	21,953,348,252		20,903,000,000
35	SMCB	21,243,000,000	88,257,000,000	14,446,000,000
36	SPMA	5,129,372,679	42,638,748,686	36,485,118,270
37	TGKA		3,244,570,849	2,169,946,013

38	TIRA	2,992,690,223	426,129,850	
39	ULTJ		18,899,864,942	44,176,093,915
40	UNVR	12,238,000,000	52,535,000,000	22,687,000,000

ASET

No.	PERUSAHAAN	ASET		
		2007	2008	2009
1	ADES	178,761,000,000	185,015,000,000	178,278,000,000
2	ADHI		5,125,368,541,520	5,629,454,335,393
3	AIMS	38,499,096,921	81,297,390,953	
4	APLI	295,233,917,027	276,082,674,266	302,381,110,626
5	ASGR		841,054,201,855	774,856,830,143
6	ASIA	69,847,283,562	63,393,973,815	74,906,215,884
7	ASII	63,520,000,000,000	80,740,000,000,000	
8	BATA	332,080,232,000	401,900,579,000	416,679,147,000
9	BIMA		107,469,136,822	94,880,851,389
10	BRPT		17,243,721,000,000	16,375,286,000,000
11	BTEL	4,664,163,794,686	2,308,318,245,852	1,731,809,267,445
12	BUDI	1,485,651,000,000	1,698,750,000,000	1,598,824,000,000
13	CEKA	613,679,506,628	685,545,222,668	568,362,939,854
14	CTRA	7,484,109,406,649		8,553,946,343,429
15	DYNA		1,235,004,262,542	1,290,590,949,137
16	EKAD	84,926,214,500		165,122,502,774
17	FISH		413,361,128,024	557,385,176,818
18	FREN		4,761,934,587,511	4,756,934,743,736
19	GJTL		8,713,559,000,000	8,877,146,000,000
20	GMTD	278,543,367,878	287,040,432,423	
21	HMSP		16,133,819,000,000	17,716,447,000,000
22	JPRS		399,343,736,262	353,951,009,577
23	KDSI	542,059,955,501	485,721,853,713	
24	KICI	80,262,032,305	86,218,216,167	84,276,874,394
25	LMPI	531,756,407,354	560,078,203,949	
26	MASA	1,799,172,358,609	2,379,024,000,000	2,536,045,000,000
27	MDRN	910,084,825,611	790,842,628,639	
28	NIPS		325,008,127,626	314,477,779,213
29	PBRX	833,092,974,381	952,742,296,102	
30	PTSP	74,008,876,918	81,755,257,118	90,667,258,170
31	SAIP		2,523,434,393,139	2,413,702,901,350
32	SIAP	96,242,071,932	142,216,191,282	
33	SIPD	1,294,772,758,402	1,384,992,127,001	1,641,295,139,974
34	SMAR	8,063,168,750,738		10,210,594,909,953
35	SMCB	7,208,250,000,000	8,208,985,000,000	7,265,366,000,000

36	SPMA	1,501,891,918,564	1,564,901,725,746	1,432,637,490,340
37	TGKA		96,595,630,270	101,746,564,873
38	TIRA	238,871,346,819	228,581,820,317	
39	ULTJ		1,718,997,392,028	1,732,701,994,634
40	UNVR	5,333,406,000,000	6,504,736,000,000	7,484,990,000,000

BEBAN PAJAK TANGGUHAN / ASET (t-1)

No.	PERUSAHAAN			
		2008	2009	2010
1	ADES	0.008486191	0.005804935	0.01010222
2	ADHI		0.002353347	0.000376468
3	AIMS	0.000157892	0.000965972	
4	APLI	0.009773129	0.056765474	0.000422197
5	ASGR		0.003453599	0.002735293
6	ASIA	0.079145056	0.069596008	0.056438873
7	ASII	0.01331864	0.000941293	
8	BATA	0.02177531	0.002286083	0.006828321
9	BIMA		0.176774655	0.035328194
10	BRPT		0.009045205	0.04610924
11	BTEL	0.008842662	0.020479114	0.04767106
12	BUDI	0.007435124	0.007414864	0.012736862
13	CEKA	0.002080602	0.006224	0.002396084
14	CTRA	0.00007		0.0000026095
15	DYNA		0.009270742	0.000788669
16	EKAD	0.005057241		0.000765136
17	FISH		0.00045908	0.000451579
18	FREN		0.010345343	0.00789791
19	GJTL		0.017759678	0.002562535
20	GMTD	0.001212108	0.003155899	
21	HMSP		0.000177515	0.000727008
22	JPRS		0.000781479	0.010442288
23	KDSI	0.00251308	0.002858997	
24	KICI	0.04564109	0.014827156	0.008663722
25	LMPI	0.002860563	0.003372485	
26	MASA	0.000728917	0.001146268	0.000613554
27	MDRN	0.009528648	0.003825555	
28	NIPS		0.00258347	0.001205395
29	PBRX	0.000487095	0.0001616	
30	PTSP	0.009876404	0.009691462	0.014138574
31	SAIP		0.046012409	0.001034708

32	SIAP	0.005982728	0.002967028	
33	SIPD	0.012979646	0.012997345	0.008521267
34	SMAR	0.00272267		0.002047187
35	SMCB	0.00294704	0.010751268	0.001988338
36	SPMA	0.003415274	0.027246918	0.025467097
37	TGKA		0.033589209	0.021326971
38	TIRA	0.01252846	0.001864233	
39	ULTJ		0.010994703	0.025495494
40	UNVR	0.002294594	0.008076423	0.003030999

MARKET VALUE EQUITY (MVE)

No.	PERUSAHAAN	MVE			
		2007	2008	2009	2010
1	ADES	589,897,000,000	589,897,000,000	589,897,000,000	589,897,000,000
2	ADHI	180,132,000,000	180,132,000,000	180,132,000,000	180,132,000,000
3	AIMS	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000
4	APLI	130,000,000,000	130,000,000,000	130,000,000,000	150,000,000,000
5	ASGR	134,878,050,000	134,878,050,000	134,878,050,000	134,878,050,000
6	ASIA	305,886,574,000	388,836,665,000	388,836,665,000	388,836,665,000
7	ASII	2,024,000,000,000	2,024,000,000,000	2,024,000,000,000	2,024,000,000,000
8	BATA	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000
9	BIMA	43,000,000,000	43,000,000,000	43,000,000,000	43,000,000,000
10	BRPT	6,979,893,000,000	6,979,893,000,000	6,979,893,000,000	6,979,893,000,000
11	BTEL	2,470,517,931,700	3,423,392,002,900	3,423,392,002,900	3,423,392,002,900
12	BUDI	461,812,000,000	469,368,000,000	469,368,000,000	471,383,000,000
13	CEKA	148,750,000,000	148,750,000,000	148,750,000,000	148,750,000,000
14	CTRA	3,270,298,337,500	3,278,374,457,500	3,791,453,998,500	3,791,453,998,500
15	DYNA	157,352,720,000	157,352,720,000	157,352,720,000	157,352,720,000
16	EKAD	27,951,000,000	27,951,000,000	27,951,000,000	27,951,000,000
17	FISH	48,000,000,000	48,000,000,000	48,000,000,000	48,000,000,000
18	FREN	2,023,587,242,700	2,023,587,242,700	2,663,476,437,700	3,155,837,634,350
19	GJTL	1,742,400,000,000	1,742,400,000,000	1,742,400,000,000	1,742,400,000,000
20	GMTD	50,769,000,000	50,769,000,000	50,769,000,000	50,769,000,000
21	HMSP	438,300,000,000	438,300,000,000	438,300,000,000	438,300,000,000
22	JPRS	75,000,000,000	75,000,000,000	75,000,000,000	75,000,000,000
23	KDSI	202,500,000,000	202,500,000,000	202,500,000,000	202,500,000,000
24	KICI	69,000,000,000	69,000,000,000	69,000,000,000	69,000,000,000
25	LMPI	504,258,834,500	504,258,834,500	504,258,834,500	504,258,834,500
26	MASA	856,642,535,000	856,642,535,000	856,642,535,000	857,075,000,000
27	MDRN	319,908,951,000	319,908,951,000	319,908,951,000	319,908,951,000

28	NIPS	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000
29	PBRX	44,544,000,000	44,544,000,000	44,544,000,000	44,544,000,000
30	PTSP	110,404,000,000	110,404,000,000	110,404,000,000	110,404,000,000
31	SAIP	1,540,860,000,025	1,540,860,000,025	1,540,860,000,025	1,540,860,000,025
32	SIAP	15,200,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000
33	SIPD	3,184,291,525,400	3,184,291,525,400	3,184,291,525,400	1,152,627,869,455
34	SMAR	574,439,000,000	574,439,000,000	574,439,000,000	574,439,000,000
35	SMCB	3,831,450,000,000	3,831,450,000,000	3,831,450,000,000	3,831,450,000,000
36	SPMA	596,818,663,200	596,818,663,200	596,818,663,200	596,818,663,200
37	TGKA	91,849,275,000	91,849,275,000	91,849,275,000	91,849,275,000
38	TIRA	58,800,000,000	58,800,000,000	58,800,000,000	58,800,000,000
39	ULTJ	577,676,400,000	577,676,400,000	577,676,400,000	577,676,400,000
40	UNVR	76,300,000,000	76,300,000,000	76,300,000,000	76,300,000,000

NET INCOME

No.	PERUSAHAAN	NET INCOME			
		2007	2008	2009	2010
1	ADES	-154,851,000,000	-15,208,000,000	16,321,000,000	31,659,000,000
2	ADHI	111,601,403,512	81,482,495,008	165,529,733,252	189,483,638,611
3	AIMS	950,039,595	1,337,482,224	654,525,005	459,487,847
4	APLI	-4,584,651,718	-4,821,452,181	30,142,714,633	24,659,768,960
5	ASGR	72,074,000,366	62,486,606,234	66,947,426,012	118,414,721,270
6	ASIA	-8,581,427,477	7,387,169,371	5,767,608,381	3,475,727,680
7	ASII	6,519,000,000,000	9,191,000,000,000	10,040,000,000,000	14,366,000,000,000
8	BATA	34,577,678,000	157,562,668,000	52,980,646,000	60,975,070,000
9	BIMA	10,311,714,579	-21,734,768,059	12,338,579,271	9,153,188,108
10	BRPT	44,533,000,000	-3,399,758,000,000	560,961,000,000	-558,630,000,000
11	BTEL	144,268,988,873	136,812,627,065	98,442,112,191	9,975,729,110
12	BUDI	46,177,000,000	32,891,000,000	146,415,000,000	46,130,000,000
13	CEKA	24,676,361,894	27,867,555,443	49,493,129,474	29,562,060,490
14	CTRA	167,961,108,575	202,219,378,189	136,327,668,227	257,959,577,688
15	DYNA	772,714,548	2,799,601	65,588,022,747	81,112,956,338
16	EKAD	4,233,068,343	4,606,369,363	16,443,338,453	24,485,164,898
17	FISH	24,890,345,237	25,040,865,781	32,580,693,547	55,586,659,742
18	FREN	50,345,297,209	-1,068,868,003,999	-724,396,366,372	1,401,813,486,084
19	GJTL	90,841,000,000	624,788,000,000	905,330,000,000	830,624,000,000
20	GMTD	7,856,944,679	8,022,795,695	13,485,473,435	27,572,486,921
21	HMSP	3,624,018,000,000	3,895,280,000,000	5,087,339,000,000	6,421,429,000,000
22	JPRS	41,566,177,061	49,157,454,353	1,917,377,909	28,445,580,508
23	KDSI	14,500,297,724	5,716,267,895	10,510,515,055	16,892,153,755

24	KICI	15,742,232,136	3,057,273,250	-5,214,569,732	3,259,699,213
25	LMPI	12,400,202,336	2,571,939,722	5,991,716,796	2,794,104,212
26	MASA	29,204,495,783	2,973,530,928	174,860,000,000	176,082,000,000
27	MDRN	1,799,209,953	2,059,099,439	12,023,983,368	41,976,947,256
28	NIPS	5,084,512,970	1,550,888,421	3,685,250,963	12,662,580,885
29	PBRX	24,637,653,757	-41,258,450,842	33,281,610,508	35,608,448,938
30	PTSP	163,410,623	4,287,122,917	10,948,539,057	15,766,633,385
31	SAIP	203,847,463,139	-434,703,084,533	335,563,711,247	-80,264,238,780
32	SIAP	320,738,236	3,693,875,519	3,122,759,054	4,023,911,407
33	SIPD	21,196,442,562	27,253,530,872	37,215,492,047	61,148,306,170
34	SMAR	988,943,863,116	1,046,389,267,147	748,495,000,000	1,260,513,000,000
35	SMCB	169,410,000,000	282,220,000,000	895,751,000,000	828,422,000,000
36	SPMA	27,397,248,948	-14,302,222,798	26,932,474,774	29,620,834,144
37	TGKA	47,190,705,624	110,721,934,404	49,592,555,990	102,503,218,904
38	TIRA	2,523,470,365	1,330,613,013	2,202,660,865	3,946,516,223
39	ULTJ	30,316,644,576	303,711,501,204	61,152,852,190	107,123,243,835
40	UNVR	1,964,652,000,000	2,407,231,000,000	3,044,107,000,000	3,384,648,000,000

NET INCOME (it) - NET INCOME i(t-1)

No.	PERUSAHAAN	NET INCOME (it) - NET INCOME i(t-1)		
		2008	2009	2010
1	ADES	139,643,000,000	31,529,000,000	15,338,000,000
2	ADHI	-30,118,908,504	84,047,238,244	23,953,905,359
3	AIMS	387,442,629	-682,957,219	-195,037,158
4	APLI	-236,800,463	34,964,166,814	-5,482,945,673
5	ASGR	-9,587,394,132	4,460,819,778	51,467,295,258
6	ASIA	15,968,596,848	-1,619,560,990	-2,291,880,701
7	ASII	2,672,000,000,000	849,000,000,000	-10,025,634,000,000
8	BATA	122,984,990,000	-104,582,022,000	7,994,424,000
9	BIMA	-32,046,482,638	34,073,347,330	-3,185,391,163
10	BRPT	-3,444,291,000,000	3,960,719,000,000	-1,119,591,000,000
11	BTEL	-7,456,361,808	-38,370,514,874	-88,466,383,081
12	BUDI	-13,286,000,000	113,524,000,000	-100,285,000,000
13	CEKA	3,191,193,549	21,625,574,031	-19,931,068,984
14	CTRA	34,258,269,614	-65,891,709,962	121,631,909,461
15	DYNA	-769,914,947	65,585,223,146	15,524,933,591
16	EKAD	373,301,020	11,836,969,090	8,041,826,445
17	FISH	150,520,544	7,539,827,766	23,005,966,195
18	FREN	-1,119,213,301,208	344,471,637,627	-677,417,119,712
19	GJTL	533,947,000,000	280,542,000,000	-74,706,000,000
20	GMTD	165,851,016	5,462,677,740	14,087,013,486

21	HMSP	271,262,000,000	1,192,059,000,000	1,334,090,000,000
22	JPRS	7,591,277,292	-47,240,076,444	26,528,202,599
23	KDSI	-8,784,029,829	4,794,247,160	6,381,638,700
24	KICI	-12,684,958,886	-8,271,842,982	8,474,268,945
25	LMPI	-9,828,262,614	3,419,777,074	-3,197,612,584
26	MASA	-26,230,964,855	171,886,469,072	1,222,000,000
27	MDRN	259,889,486	9,964,883,929	29,952,963,888
28	NIPS	-3,533,624,549	2,134,362,542	8,977,329,922
29	PBRX	-65,896,104,599	74,540,061,350	2,326,838,430
30	PTSP	4,123,712,294	6,661,416,140	4,818,094,328
31	SAIP	-638,550,547,672	770,266,795,780	-415,827,950,027
32	SIAP	3,373,137,283	-571,116,465	901,152,353
33	SIPD	6,057,088,310	9,961,961,175	23,932,814,123
34	SMAR	57,445,404,031	-297,894,267,147	512,018,000,000
35	SMCB	112,810,000,000	613,531,000,000	-67,329,000,000
36	SPMA	-41,699,471,746	41,234,697,572	2,688,359,370
37	TGKA	63,531,228,780	-61,129,378,414	52,910,662,914
38	TIRA	-1,192,857,352	872,047,852	1,743,855,358
39	ULTJ	273,394,856,628	-242,558,649,014	45,970,391,645
40	UNVR	442,579,000,000	636,876,000,000	340,541,000,000

SCALED EARNING CHANGES

No.	PERUSAHAAN	SCALED EARNING CHANGES <NET INCOME (it) - NET INCOME i(t-1)/ MVE i(t-1)>		
		2008	2009	2010
1	ADES	0.236724377	0.053448314	0.026001149
2	ADHI	-0.167204653	0.466586938	0.132979734
3	AIMS	0.035222057	-0.06208702	-0.017730651
4	APLI	-0.001821542	0.268955129	-0.042176505
5	ASGR	-0.071081945	0.033072985	0.381583922
6	ASIA	0.052204308	-0.004165145	-0.005894199
7	ASII	1.320158103	0.419466403	-4.953376482
8	BATA	9.460383846	-8.044770923	0.614955692
9	BIMA	-0.745267038	0.792403426	-0.074078864
10	BRPT	-0.493458997	0.567446951	-0.160402316
11	BTEL	-0.003018137	-0.011208332	-0.025841733
12	BUDI	-0.028769283	0.241865658	-0.213659644
13	CEKA	0.021453402	0.14538201	-0.13399038
14	CTRA	0.010475579	-0.020098897	0.032080545
15	DYNA	-0.004892924	0.416803873	0.098663268
16	EKAD	0.013355552	0.423490004	0.287711583
17	FISH	0.003135845	0.157079745	0.479290962
18	FREN	-0.55308379	0.170228212	-0.254335691
19	GJTL	0.306443411	0.161008953	-0.042875344
20	GMTD	0.003266777	0.107598687	0.277472739
21	HMSP	0.618895734	2.71973306	3.043782797
22	JPRS	0.101217031	-0.629867686	0.353709368
23	KDSI	-0.043377925	0.023675295	0.031514265
24	KICI	-0.183839984	-0.119881782	0.122815492
25	LMPI	-0.019490512	0.006781789	-0.006341213
26	MASA	-0.030620666	0.200651336	0.001426499
27	MDRN	0.000812386	0.031149125	0.093629652
28	NIPS	-0.176681227	0.106718127	0.448866496
29	PBRX	-1.479348613	1.673402958	0.052236854
30	PTSP	0.037351113	0.060336728	0.043640578
31	SAIP	-0.414411788	0.499894082	-0.269867444
32	SIAP	0.221916927	-0.009518608	0.015019206
33	SIPD	0.001902178	0.00312847	0.007515899
34	SMAR	0.100002618	-0.518582943	0.891335721
35	SMCB	0.029443161	0.160130238	-0.017572721
36	SPMA	-0.069869584	0.069090831	0.004504483
37	TGKA	0.691690041	-0.66554013	0.576059669
38	TIRA	-0.02028669	0.014830746	0.029657404

39	ULTJ	0.473266446	-0.41988672	0.079578102
40	UNVR	5.80051114	8.346998689	4.463184797

VARIABEL DUMMY

No.	PERUSAHAAN	Variabel Dummy			TOTAL SEC
		SEC 2008	SEC 2009	SEC 2010	
1	ADES	1	1	1	3
2	ADHI	0	1	1	2
3	AIMS	1	0	0	1
4	APLI	0	1	0	1
5	ASGR	0	1	1	2
6	ASIA	1	0	0	1
7	ASII	1	1	0	2
8	BATA	1	0	1	2
9	BIMA	0	1	0	1
10	BRPT	0	1	0	1
11	BTEL	0	0	0	0
12	BUDI	0	1	0	1
13	CEKA	1	1	0	2
14	CTRA	1	0	1	2
15	DYNA	0	1	1	2
16	EKAD	1	1	1	3
17	FISH	1	1	1	3
18	FREN	0	0	0	0
19	GJTL	1	1	0	2
20	GMTD	1	1	1	3
21	HMSP	1	1	1	3
22	JPRS	1	1	1	3
23	KDSI	0	0	1	1
24	KICI	0	0	1	1
25	LMPI	0	0	0	0
26	MASA	0	0	1	1
27	MDRN	1	1	1	3
28	NIPS	0	0	1	1
29	PBRX	0	0	1	1
30	PTSP	1	1	1	3
31	SAIP	0	0	0	0
32	SIAP	1	1	1	3
33	SIPD	1	1	1	3
34	SMAR	1	1	1	3
35	SMCB	1	1	0	2

36	SPMA	0	1	1	2
37	TGKA	1	0	1	2
38	TIRA	0	1	1	2
39	ULTJ	1	0	1	2
40	UNVR	1	1	1	3

Keterangan: SEC = Scaled Earning Changes

DATA HASIL PENELITIAN

No.	Perusahaan	Time	Manajemen Laba (Y)		Beban Pajak Tangguhan (X)
			Kategori	Dummy	
1	ADES	2007-2008	range small profit firms	1	0,008486191
2	AIMS	2007-2008	range small profit firms	1	0,000157892
3	APLI	2007-2008	range small loss firms	0	0,009773129
4	ASIA	2007-2008	range small profit firms	1	0,079145056
5	ASII	2007-2008	range small profit firms	1	0,01331864
6	BATA	2007-2008	range small profit firms	1	0,02177531
7	BTEL	2007-2008	range small loss firms	0	0,008842662
8	BUDI	2007-2008	range small loss firms	0	0,007435124
9	CEKA	2007-2008	range small profit firms	1	0,002080602
10	CTRA	2007-2008	range small profit firms	1	0,00007
11	EKAD	2007-2008	range small profit firms	1	0,005057241
12	GMTD	2007-2008	range small profit firms	1	0,001212108
13	KDSI	2007-2008	range small loss firms	0	0,00251308
14	KICI	2007-2008	range small loss firms	0	0,04564109
15	LMPI	2007-2008	range small loss firms	0	0,002860563
16	MASA	2007-2008	range small loss firms	0	0,000728917
17	MDRN	2007-2008	range small profit firms	1	0,009528648
18	PBRX	2007-2008	range small loss firms	0	0,000487095
19	PTSP	2007-2008	range small profit firms	1	0,009876404
20	SIAP	2007-2008	range small profit firms	1	0,005982728
21	SIPD	2007-2008	range small profit firms	1	0,012979646
22	SMAR	2007-2008	range small profit firms	1	0,00272267
23	SMCB	2007-2008	range small profit firms	1	0,00294704
24	SPMA	2007-2008	range small loss firms	0	0,003415274
25	TIRA	2007-2008	range small loss firms	0	0,01252846
26	UNVR	2007-2008	range small profit firms	1	0,002294594
27	ADES	2008-2009	range small profit firms	1	0,005804935
28	ADHI	2008-2009	range small profit firms	1	0,002353347
29	AIMS	2008-2009	range small loss firms	0	0,000965972
30	APLI	2008-2009	range small profit firms	1	0,056765474
31	ASGR	2008-2009	range small profit firms	1	0,003453599
32	ASIA	2008-2009	range small loss firms	0	0,069596008
33	ASII	2008-2009	range small profit firms	1	0,000941293
34	BATA	2008-2009	range small loss firms	0	0,002286083

No.	Perusahaan	Time	Manajemen Laba (Y)		Beban Pajak Tangguhan (X)
			Kategori	Dummy	
35	BIMA	2008-2009	range small profit firms	1	0,176774655
36	BRPT	2008-2009	range small profit firms	1	0,009045205
37	BTEL	2008-2009	range small loss firms	0	0,020479114
38	BUDI	2008-2009	range small profit firms	1	0,007414864
39	CEKA	2008-2009	range small profit firms	1	0,006224
40	DYNA	2008-2009	range small profit firms	1	0,009270742
41	FISH	2008-2009	range small profit firms	1	0,00045908
42	FREN	2008-2009	range small profit firms	1	0,010345343
43	GJTL	2008-2009	range small profit firms	1	0,017759678
44	GMTD	2008-2009	range small profit firms	1	0,003155899
45	HMSF	2008-2009	range small profit firms	1	0,000177515
46	JPRS	2008-2009	range small loss firms	0	0,000781479
47	KDSI	2008-2009	range small profit firms	1	0,002858997
48	KICI	2008-2009	range small loss firms	0	0,014827156
49	LMPI	2008-2009	range small profit firms	1	0,003372485
50	MASA	2008-2009	range small profit firms	1	0,001146268
51	MDRN	2008-2009	range small profit firms	1	0,003825555
52	NIPS	2008-2009	range small profit firms	1	0,00258347
53	PBRX	2008-2009	range small profit firms	1	0,0001616
54	PTSP	2008-2009	range small profit firms	1	0,009691462
55	SAIP	2008-2009	range small profit firms	1	0,046012409
56	SIAP	2008-2009	range small loss firms	0	0,002967028
57	SIPD	2008-2009	range small profit firms	1	0,012997345
58	SMCB	2008-2009	range small profit firms	1	0,010751268
59	SPMA	2008-2009	range small profit firms	1	0,027246918
60	TGKA	2008-2009	range small loss firms	0	0,033589209
61	TIRA	2008-2009	range small profit firms	1	0,001864233
62	ULTJ	2008-2009	range small loss firms	0	0,010994703
63	UNVR	2008-2009	range small profit firms	1	0,008076423
64	ADES	2009-2010	range small profit firms	1	0,0101022
65	ADHI	2009-2010	range small profit firms	1	0,000376468
66	APLI	2009-2010	range small loss firms	0	0,000422197
67	ASGR	2009-2010	range small profit firms	1	0,002735293
68	ASIA	2009-2010	range small loss firms	0	0,056438873
69	BATA	2009-2010	range small profit firms	1	0,006828321
70	BIMA	2009-2010	range small loss firms	0	0,035328194
71	BRPT	2009-2010	range small loss firms	0	0,04610924
72	BTEL	2009-2010	range small loss firms	0	0,04767106
73	BUDI	2009-2010	range small loss firms	0	0,012736862
74	CEKA	2009-2010	range small loss firms	0	0,002396084
75	CTRA	2009-2010	range small profit firms	1	0,0000026095
76	DYNA	2009-2010	range small profit firms	1	0,000788669

No.	Perusahaan	Time	Manajemen Laba (Y)		Beban Pajak Tangguhan (X)
			Kategori	Dummy	
77	EKAD	2009-2010	range small profit firms	1	0,000765136
78	FISH	2009-2010	range small profit firms	1	0,000451579
79	FREN	2009-2010	range small loss firms	0	0,00789791
80	GJTL	2009-2010	range small loss firms	0	0,002562535
81	HMSP	2009-2010	range small profit firms	1	0,000727008
82	JPRS	2009-2010	range small profit firms	1	0,010442288
83	KICI	2009-2010	range small profit firms	1	0,008663722
84	MASA	2009-2010	range small profit firms	1	0,000613554
85	NIPS	2009-2010	range small profit firms	1	0,001205395
86	PTSP	2009-2010	range small profit firms	1	0,014138574
87	SAIP	2009-2010	range small loss firms	0	0,001034708
88	SIPD	2009-2010	range small profit firms	1	0,008521267
89	SMAR	2009-2010	range small profit firms	1	0,002047187
90	SMCB	2009-2010	range small loss firms	0	0,001988338
91	SPMA	2009-2010	range small profit firms	1	0,025467097
92	TGKA	2009-2010	range small profit firms	1	0,021326971
93	ULTJ	2009-2010	range small profit firms	1	0,025495494
94	UNVR	2009-2010	range small profit firms	1	0,003030999

Logistic Regression

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	94	100,0
	Missing Cases	0	,0
	Total	94	100,0
Unselected Cases		0	,0
Total		94	100,0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
range small loss firms	0
range small profit firms	1

Block 0: Beginning Block

Iteration History ^{a,b,c}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 1		117,755	,723
0 2		117,731	,757
3		117,731	,758

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 117,731

c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001.

Classification Table^{a,b}

Observed			Predicted		
			Manajemen Laba (Y)		Percentage Correct
			range small loss firms	range small profit firms	
Step 0	Manajemen Laba (Y)	range small loss firms	0	30	,0
		range small profit firms	0	64	100,0
Overall Percentage					68,1

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is ,500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	,758	,221	11,726	1	,001	2,133

Variables not in the Equation

	Score	df	Sig.
Step 0 Variables Variable_X	,492	1	,483
Overall Statistics	,492	1	,483

Block 1: Method = Enter

Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients	
		Constant	Variable_X
Step 1	117,294	,799	-5,812
1 2	117,264	,842	-6,233
3	117,264	,842	-6,237
4	117,264	,842	-6,237

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 117,731

d. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	,466	1	,495
	Block	,466	1	,495
	Model	,466	1	,495

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	117,264 ^a	,005	,007

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	6,159	8	,629

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

		Manajemen Laba (Y) = range small loss firms		Manajemen Laba (Y) = range small profit firms		Total
		Observed	Expected	Observed	Expected	
Step 1	1	5	3,599	4	5,401	9
	2	3	3,019	6	5,981	9
	3	4	2,864	5	6,136	9
	4	1	2,827	8	6,173	9
	5	3	2,806	6	6,194	9
	6	1	2,763	8	6,237	9
	7	3	2,743	6	6,257	9
	8	4	2,736	5	6,264	9
	9	3	2,722	6	6,278	9
	10	3	3,921	10	9,079	13

The Cut Value is ,50
Symbols: 0 - range small loss firms
 1 - range small profit firms
Each Symbol Represents 5 Cases.

Statistik Deskriptif

Statistics

Beban Pajak Tangguhan (X)

N	Valid	94
	Missing	0
Mean		,0131
Median		,0059
Mode		,00 ^a
Std. Deviation		,02334
Variance		,001
Skewness		4,429
Std. Error of Skewness		,249
Kurtosis		26,301
Std. Error of Kurtosis		,493
Range		,18
Minimum		,00
Maximum		,18
Sum		1,23

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown